

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM *URBAN SANITATION AND*
***RURAL INFRASTRUCTURE* INSTALASI PENGOLAHAN AIR**
LIMBAH USRI-IPAL KOMUNAL DI KOTA MALANG TAHUN
2013-2014

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya Malang



Disusun Oleh:
RYKY HAPPY PRASETYO
105120403111011

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

LEMBAR PENGESAHAN

**Implementasi Program Urban Sanitation And Rural Infrastructure Instalasi
Pengolahan Air Limbah USRI-IPAL Komunal di Kota Malang Pada Tahun
2013-2014**

SKRIPSI

Disusun Oleh :
RYKY HAPPY PRASETYO
NIM.105120403111011

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 27 Juli 2017

Ketua Majelis Penguji



Asih Purwanti, S.IP., M.IP.
NIK.2010117710292001

Sekretaris Majelis Penguji



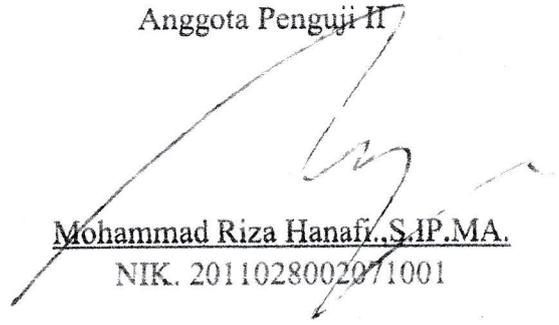
Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos, M.si
NIK.2013098602142001

Anggota Penguji I



Gris Sintya Berlian, S.Hub.Intl., MA.
NIK.2016079008252001

Anggota Penguji II



Mohammad Riza Hanafi, S.IP.MA.
NIK. 2011028002071001

Malang, 09 Agustus 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038
Website : www.fisip.ub.ac.id Email : fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1605/UN10.F11.05.01/PP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan Penguji tanggal 21 Juli 2017 oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Asih Purwanti, S.IP., M.IP.
NIP/NIK. : 2010117710292001
Tugas : Ketua Majelis Penguji
2. Nama : Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si
NIP/NIK. : 2013098602142001
Tugas : Sekretaris Majelis Penguji
3. Nama : Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA.
NIP/NIK. : 2016079008252001
Tugas : Anggota Majelis Penguji I *
4. Nama : Muhammad Riza Hanafi., S.IP., MIA.
NIP/NIK. : 2011028002071001
Tugas : Anggota Majelis Penguji II *

Sebagai Tim Penguji Skripsi bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **RYKY HAPPY PRASETYO**
NIM : 105120403111011
Program Studi : Hubungan Internasional
Bidang Peminatan : *International Social and Cultural Development*
Judul Skripsi : Implementasi Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure Instalasi Pengolahan Air Limbah (USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Matang, 18 AUG 2017
a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197509182005012001

Keterangan : *) Anggota Majelis Penguji 1 adalah Pembimbing 1
Anggota Majelis Penguji 2 adalah Pembimbing 2

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Hubungan Internasional;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama : RYKY HAPPY PRASETYO

NIM : 105120403111011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Urban Sanitation And Rural Infrastructure Instalasi Pengolahan Air Limbah USRI-IPAL Komunal di Kota Malang Pada Tahun 2013-2014”** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Malang, 12 Juli 2017

Pembuat pernyataan



Ryky Happy Prasetyo

105120403111011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ryky Happy Prasetyo
Jl. Lebo Agung III/80 Surabaya
Hp. +6282233446922
E-mail: rikyprasetyo24@gmail.com

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Ryky Happy Prasetyo
Alamat	Jl. MT. Haryono Ruko Ditas Kavling 17 Lantai 3 Malang
Telepon/HP	+6282233446922
Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 24 Februari 1990
E-mail	rikyprasetyo24@gmail.com
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status	Belum menikah
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Tinggi dan Berat Badan	170 cm dan 70 kg

PENDIDIKAN FORMAL

Tingkatan	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun
SD	SDN Ploso V Surabaya	-	1997-2003
SMP	SMPN 1 Surabaya	-	2003-2006
SMA	SMAN 2 Surabaya	Ilmu Pengetahuan Sosial	2006-2009
S1	Universitas Brawijaya	Hubungan Internasional	2010-Sekarang

PENGALAMAN PELATIHAN KERJA

PERUSAHAAN	JABATAN	TAHUN
BKBPM Kota Malang	Staff Administrasi	September 2015-November 2015

PENGALAMAN KERJA

PERUSAHAAN	JABATAN	TAHUN
BKBPM Kota Malang	Staff Administrasi	Juni 2015-Desember 2015
SATKER PIP Kota Malang	Staff Administrasi	Januari 2016-April 2016
PT Mahakarya Evelyn Mughnii Development	Marketing	September 2016-November 2016
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang	Staff Administrasi	Januari 2017-Mei 2017

PENGALAMAN PELATIHAN

PELATIHAN	PENYELENGGARA	TAHUN
Toeic	Universitas Brawijaya	2013
IC3	Universitas Brawijaya	2013
Toefl	Universitas Brawijaya	2017

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Ryky Happy Prasetyo)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Terimakasih teruntuk Tuhanku yang Maha Hebat Allah SWT, Sang Khalik yang Maha Rahmat dan Rahim. Keberadaan-Mu yang selalu mengajarkan betapa kerasnya hidup dan pada akhirnya saya kembali di titik “fabiayyi ala irabbikuma Tukadziban” “maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan” Terima kasih atas segala kisah yang berliku liku nan penuh pesona ini.

Buat kedua Orang Tuaku Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan dukungan untuk segala sesuatu yang aku inginkan dan cita-citakan. yang selalu sabar mendidik aku mulai sejak kecil dan sampai saat ini.

Buat saudara-saudara kandung yang selalu memberikan kekuatan dan kesadaran bagi aku sebagai anak bungsu yang penuh dengan ketermanjaan, keluh kesah atas perjuangan, dan rasa dengki. Terimakasih atas kesadaran hidup dari keterlanaan mimpi yang berkepanjangan untuk menjadi lelaki yang lebih hebat dari Anda-Anda semua kakakku terkasih.

Untuk dosen pembimbingku Ibu Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA dan Bapak M Riza Hanafi S.IP., MIA yang menyumbangkan pemikiran, ide, waktu dan ilmu tak terhingga dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dosen-Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang. Ibu erza Killian, ibu Desy Arya Pinatih, ibu Asih, Bapak Fathoni, Bapak Joko, Bapak Aswin Ariyanto Azis, Ibu Melly, Bapak Mahendra, Ibu Dian Mutmainah, Ibu Lia, Bapak Yusli Effendi telah sudi membukakan ilmu dan pengetahuan begitu yang massive bagi saya.

Bagi mereka sahabat-sahabat hebatku. Yang selalu memberikan waktu, kesempatan, senyum dan Semangat: Bangkit Mahaztra, Rina Prasetyaningtyas, Lely Kuswindiwati, Ahmad Syafiq, Raunaq Rosih, Irfan Hamami, Friando, Budi, Jeddy dan Nova Adi Kuncoro .

Terimakasih banyak atas kesejukan dan kedamaian-kedamaiannya selama ini. Semoga persembahan ini mampu mengantarkan kepada Anda yang tertulis sebagai bentuk secuil apresiasi dari saya bahwa Anda adalah orang-orang hebat yang telah diturunkan Tuhan untuk mewarnai kehidupan ini.

Ryky Happy Prasetyo

ABSTRAKSI

Indonesia tentu membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam berbagai bidang, salah satunya terkait dengan penerimaan negara yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang di-Rupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah ADB dimana pemerintah Indonesia dan ADB telah bekerjasama sejak ADB berdiri di tahun 1966. Salah satu program Indonesia dalam penanganan masalah yang dihadapi Indonesia terletak pada kondisi sanitasi. Kondisi ini yang mendorong pembentukan program yang dinamakan *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)* yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Salah satu ruang lingkup Program SPBM USRI adalah penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) komunal dengan sistem perpipaan dan/atau kombinasi MCK dan perpipaan.

Kata Kunci : sanitasi, USRI IPAL, ADB, pinjaman

ABSTRACT

Indonesia definitely requires a good corporation with any other parties in several sectors, one of those sectors is relate to the state revenue derived from foreign loans. Foreign borrowing constitutes any state revenue either in the form of foreign exchange and / or foreign exchange which is denominated or in the form of goods and or in the form of services obtained from foreign lenders that must be repaid with certain conditions. One is the ADB where the governments of Indonesia and ADB have been working since ADB was founded in 1966. One of Indonesia's programs in dealing with the problems facing Indonesia lies in sanitary conditions. This condition encouraged the formation of a program called Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) organized as a support program of PNPM Mandiri. One of the scope of SPBM Program of USRI is the provision of community sanitation infrastructure including Communal Wastewater Treatment Plant (IPAL) with piping system and / or combination of MCK and piping

Keywords: saniationi, USRI IPAL, ADB , loan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Urban Sanitation And Rural Infrastructure Instalasi Pengolahan Air Limbah USRI-IPAL Komunal di Kota Malang Pada Tahun 2013-2014.”** Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada :

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis;
2. Bapak Prof.Dr.Unti Ludigdo,Ak selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya;
3. Ibu Gris Sintya Berlian,S.Hub.Intl.,MA selaku dosen pembimbing pertama penulis yang banyak memberikan masukan dan motivasi selama proses penulisan;
4. Bapak Mohammad Riza Hanafi.,S.IP.,MA selaku dosen pembimbing kedua penulis atas perbaikan yang diberikan untuk kebaikan penulisan skripsi ini dan penyemangat untuk menyelesaikannya secepat mungkin;
5. Ibu Asih Purwanti, S.IP.,M.IP selaku ketua majelis penguji sidang skripsi;
6. Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos.,M.si selaku sekretaris majlis penguji dalam sidang skripsi penulis;
7. Bagi seluruh dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang atas ilmu dan pengalaman yang dibagi selama penulis menempuh pendidikan.
8. Mas Dadang yang selalu membantu penulis dalam bidang proses administratif Skripsi

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhirnya, Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi jurusan, masukan bagi para dosen, serta bagi teman-teman pada tahun-tahun mendatang.

Malang, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Penelitian	12

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Kerangka Teori.....	20
2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan	20
2.3. Definisi Operasionalisasi.....	33
2.4. Alur Pemikiran	37
2.5. Argumen Utama	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Teknik Analisa Data	42
3.5. Sistematika Penulisan	43

BAB IV GAMBARAN UMUM PEKERJAAN UMUM DAN PROGRAM USRI IPAL

4.1 Pekerjaan Umum	44
4.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47
4.1.2 Struktur Organisasi Pekerjaan Umum	51
4.1.3 Produk Pekerjaan Umum	53
4.2 Program USRI IPAL	57

BAB V IMPLEMENTASI DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MALANG PADA PROGRAM SANITASI BERBASIS USRI IPAL KOMUNAL

5.1 Komunikasi Dinas PU dalam Konteks Internal dan Eksternal	64
5.1.1 Transmisi Dinas PU dan program USRI IPAL	64
5.1.2 Kejelasan Pada Program USRI IPAL kota Malang	72
5.1.3 Konsistensi Program USRI IPAL kota Malang	78
5.2 Sumber Daya Dinas PU dalam Program USRI IPAL	83
5.2.1 Staf Pada Program USRI IPAL Kota Malang	83
5.2.2 Informasi Pada Program USRI IPAL Kota Malang	82
5.2.3 Wewenang Dinas PU Pada Program USRI IPAL Kota Malang	88
5.2.4 Fasilitas Pada Program USRI IPAL Kota Malang	93

5.3 Sikap/Disposisi Dinas PU dalam Program USRI IPAL	95
5.4 Struktur Birokrasi PU dalam Program USRI IPAL	96
5.4.1 Organisasi Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota	96
5.4.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kelurahan.....	102
5.4.3 Organisasi Tingkat Pengelola Masyarakat	103
5.4.4 Konsultan Manajemen.....	109
5.4.5 Tenaga Fasilitator Lapangan	115

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	120
6.2 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.1 Variabel dan Indikator Konsep Implementasi Kebijakan	33
Tabel 5.1 Kelembagaan Tingkat Masyarakat Pada Program USRI IPAL di Kota Malang pada tahun 2013	58
Tabel 5.2 Kelembagaan Tingkat Masyarakat Pada Program USRI IPAL di Kota Malang pada tahun 2014	70
Tabel 5.3 Data Lahan Program USRI IPAL Komunal Kota Malang Tahun 2013	76
Tabel 5.4 Data Lahan Program USRI IPAL Komunal Kota Malang Tahun 2013	77
Tabel 5.5 Pemanfaatan Sarana Infrastruktur Program Sanitasi USRI IPAL 2013	81
Tabel 5.6 Pemanfaatan Realisasi Program USRI IPAL 2013	82
Tabel 5.7 Pemanfaatan Realisasi Program USRI IPAL 2014	83
Tabel 5.8 Tenaga Kerja pada Program USRI IPAL 2013	85
Tabel 5.9 Tenaga Kerja pada Program USRI IPAL 2014	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi George C.Edward III	30
Gambar 2.4 Alur Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	51
Gambar 5.1 Struktur Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 5 pulau besar dari 30 gugusan pulau kecil. Kepulauan ini terbentang di antara dua samudera pasifik dan samudra hindia, dan di antara dua benua yakni benua Australia dan Asia. Posisi strategis ini yang mampu mempengaruhi segala jenis aspek baik kebudayaan, sosial, politik, dan kehidupan ekonomi.

Melalui letak Astronomis tersebut menjadikan Negara Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dengan ekosistem hutan hujan tropis yang bernilai tinggi, memiliki penyinaran matahari yang lebih lama. Kondisi kelembaban Indonesia pun dalam level yang tinggi. Sedangkan untuk pendukung letak fisiografisnya, Indonesia di kelilingi oleh beberapa jenis lautan di berbagai arah yang mengakibatkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut. Tidak cukup dengan kondisi tersebut. keadaan letak geologis Indonesia mengakibatkan Negara ini menjadi kaya akan hasil tambang mineral karena memiliki laut yang sangat luas. Keberagaman pulau menjadikan Indonesia menjadi kaya akan Sosial Budaya dengan sebutan negara yang unik, dimana setiap suku, budaya, dan agama yang ada memiliki cirri khas masing-masing. ¹

¹ Posisi Geografis Indonesia dalam Peta Dunia, diakses dari alamat <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/posisi-geografis-indonesia> pada tanggal 29 juli 2017

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berkembang atau negara-negara berpenghasilan menengah dengan pendapatan perkapita pasca krisis ekonomi 1997 US\$ 500-750 per bulan.² Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam berbagai bidang, salah satunya terkait dengan penerimaan negara yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang di-Rupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman luar negeri Indonesia berdasarkan sumber-sumber dananya dibedakan dalam bentuk:(1) pinjaman multilateral yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan sebagainya; dan (2)pinjaman bilateral yang berasal dari negara-negara, baik yang tergabung dalam CGI maupun intergovernment dan pinjaman sindikasi yang diperoleh dari beberapa bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) internasional, pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank/LKBB yang bertindak sebagai syndication leader. Adapun berdasarkan jenisnya, pinjaman dan hibah luar negeri terdiri dari: (1) bantuan proyek (project aid), umumnya bersifat

²Ahmad Jamli, 2009, *Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter*, Seri Diktat Kuliah Universitas Gunadarma, http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijaksanaan_fiskal_moneter/bab4-bantuan_luar_negeri_pemerintah_dalam_perekonomian_indonesia.pdf

soft loan atau loan; (2) bantuan teknis (technical assistance), berupa hibah atau grant; dan (3) bantuan program (program aid).³

Pinjaman Luar Negeri dimaksudkan untuk mampu memnuhi kebutuhan negara dalam menjalankan program berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan bagsa dan negara itu sendiri. bantuan luar negeri dimaksudkan untuk biasa memberikan sumbangsih pada jumlah biaya minimal yang dimiliki oleh negara berkembang. Beberapa kasus yang dijalankan negara juga menjadi *Sustainable Development goals* seperti yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa seperti kasus mengenai kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang baik, kesetaraan pendidikan, persamaan gender, air bersih dan sanitasi, energy, pertumbuhan ekonomi, industri, komunitas dan kehidupan kota yang berkelanjutan, aksi atas iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan hayati, konsumsi yang bertanggung jawab dan produksi, kemitraan, dan perdamaian.⁴

Salah satu dari permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berada di Asia Tenggara adalah Sanitasi. Kondisi air bersih dan sanitasi menjadi masalah besar bagi dunia. Seperti yang dilangsir dalam Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa tujuan dicanangkan program ini untuk memberikan akses pada sumber air bersih dan sanitasi yang bagus untuk warga dunia. Pengaksesan air bersih dan sanitasi yang bagus adalah

³Direktorat Pinjaman dan Hibah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia “ Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Pemerintah Semester 1 Tahun 2011” diakses pada alamat https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Lap_Pengelolaan_PH_Semester1.pdf pada tanggal 03 Maret 2017

⁴Sustainable Development Goals .17 Goals to transform our World. diakses dari alamat <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/#prettyPhoto> pada tanggal 30 juli 2017

hak asasi manusia, namun kondisinya masi ditemui tantangan besar yang sangat mendasar tentang kondisi tersebut. sekitar 1.8 milyar orang di seluruh dunia menggunakan sumber air minum yang sudah terkontaminasi. Beberapa dari 2.4 milyar orang kekurangan akses untuk mendapatkan sanitasi yang bagus. Dan kelangkaan air menimbulkan efek lebih dari 40 persen di seluruh dunia dan proyeksi semakin meningkat tiap tahunnya.⁵

Kondisi sanitasi di beberapa negara berkembang di dunia, khususnya di Indonesia cukup memprihatinkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa 2,5 miliar orang di dunia masih hidup dengan sanitasi yang buruk, salah satunya terbanyak di Indonesia.⁶ Dari 10 negara dengan jumlah tertinggi orang yang belum mendapatkan sanitasi yang layak, Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua, setelah India. Sebanyak 22 negara mencapai lebih dari 80 persen dari buang air besar (BAB) sembarangan di dunia.⁷ Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi terburuk. Menurut data yang dipublikasikan PBB, 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan masih BAB sembarangan di sungai, laut, atau di permukaan tanah.⁸Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan perbaikan kondisi sanitasi bagi penduduknya, dan untuk itu

⁵United Nations, “Clean Water and Sanitation. Why it matter?” diakses pada alamat http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf pada tanggal 30 juli 2017

⁶ Merry Wahyuningsih, 25 Maret 2013, *10 Negara dengan Sanitasi Terburuk di Dunia, Indonesia Peringkat 2*, <http://health.detik.com/read/2013/03/25/090253/2202429/763/10-negara-dengan-sanitasi-terburuk-di-dunia-indonesia-peringkat-2>

⁷*Ibid.*

⁸ Tabita Diela, 31 Oktober 2013, *Indonesia, Negara dengan Sanitasi Terburuk Kedua di Dunia!* <http://properti.kompas.com/read/2013/10/31/1209048/Indonesia.Negara.dengan.Sanitasi.Terburuk.Kedua.di.Dunia>.

dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal inilah yang melatarbelakangi Indonesia membuat kesepakatan pinjaman kepada ADB.

Sementara di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia untuk kondisi sanitasinya, berada di urutan ketiga dari bawah setelah Laos dan Myanmar.⁹ Akibat sanitasi tersebut, Indonesia masih memiliki permasalahan efek dari sanitasi buruk terdapat pada penyakit diare yang masih dalam kuantitas besar sebagai penyebab kematian pada anak dibawah usia lima tahun, dalam data yang dilansir oleh Unicef sendiri. laporan pada tahun 2007 Riskesdas menjelaskan bahwa diare menyebabkan 31% kematian antara umur 1 bulan hingga satu tahun, 25 % antara umur satu tahun hingga empat tahun. Dibandingkan anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan air ledeng, tingkat diare adalah lebih tinggi 34 persen di antara anak-anak dari rumah tangga menggunakan sumur terbuka untuk air minum. apalagi, tingkat diare lebih tinggi sebesar 66 persen pada anak kecil dari keluarga yang memiliki sanitasi terbuka dengan buang air besar di sungai daripada yang ada di Indonesia Rumah tangga dengan fasilitas toilet pribadi dan tangki kotoran.¹⁰

Oleh karena itu, *Asian Development Bank* (ADB) telah menggelontorkan dana hibah sekitar 60 juta dolar AS (tepatnya \$ 52,500,000 berdasarkan Tabel 1) untuk Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) di lima provinsi pada 2011-2014 untuk mendukung suksesnya Program Nasional Pemberdayaan

⁹ Republika, 19 Desember 2008, *Sistem Sanitasi di Indonesia Perlu Dibenahi*, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/21190>

¹⁰ Unicef Indonesia, October 2012. "issue Briefs. Water, Sanitation and Hygiene" diakses melalui alamat https://www.unicef.org/indonesia/A8-_E_Issue_Brief_Water_Sanitation_REV.pdf pada tanggal 30 juli 2017.

Masyarakat Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Kelima provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.¹¹

Situasi yang menjadi hal penting saat ini adalah situasi perkotaan dengan penduduk masih dalam taraf kekayaan yang rendah membutuhkan perhatian atas permasalahan sanitasi. Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan urbanisasi yang cepat, dengan perkotaan yang tumbuh lebih cepat daripada negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 2025 diharapkan 67,5% penduduk negara akan tinggal di perkotaan. Tantangan datang dari tingkat urbanisasi yang tinggi. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pengelolaan fasilitas sanitasi yang baik.¹² Apalagi dengan daerah kumuh perkotaan, daerah ini yang menimbulkan permasalahan sanitasi yang buruk, praktik kebersihan yang tidak memadai, kepadatan penduduk yang berlebihan, dan air yang terkontaminasi. Sehingga tidak jarang bahwa kondisi ini menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti disentri, kolera, dan penyakit penyakit ganas lainnya. Seperti yang dilansir pada *World Bank*, layanan sanitasi yang tidak memadai juga berdampak pada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sanitasi perkotaan sendiri mengalami berbagai hambatan karena kurangnya biaya sanitasi yang cukup untuk

¹¹Berita Satu, 29 Mei 2012, *Sanitasi RI Terburuk Ke 3 di ASEAN, ADB Hibahkan Dana US\$ 60 Juta*, <http://www.beritasatu.com/nasional/50804-sanitasi-ri-terburuk-ke-3-di-asean-adb-hibahkan-dana-us-60-juta.html>

¹² The World Bank, March 21 2017. “ Meeting Indonesia’s urban Sanitation Needs” diakses dari alamat <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/21/meeting-indonesia-urban-sanitation-needs> pada tanggal 30 Juli 2017

dijalankan. Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bagus belum mengimbangi peningkatan pemberantasan masalah sanitasi perkotaan.¹³

Sanitasi perkotaan itu mengarah pada Kota Malang yang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Dan merupakan kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Jawa Timur yakni Surabaya.¹⁴

Malang sendiri terlihat jelas memiliki permasalahan mengenai sanitasi dan air bersih. Sehingga pemerintah kota Malang mengkonsentrasikan pada Permasalahan sanitasi masyarakat sekarang ini menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat, pencanangan 100-0-100 merupakan satu bukti bahwa sanitasi adalah masalah serius, pemerintah melalui 100-0-100 ingin menyediakan 100% Sanitasi yang layak bagi masyarakat, 0% permukiman kumuh dan 100% Akses Air Bersih bagi masyarakat dengan tujuan untuk memisahkan dan membuang limbah biologis dan kimiawi

¹³ The World Bank, October 28 2013. " Poor sanitation Impedes Indonesia's Growth Potential" diakses melalui alamat <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/28/Poor-Sanitation-Impedes-Indonesia-8217-s-Growth-Potential> pada tanggal 30 Juli 2017

¹⁴Pemerintah Kota Malang. "*Sejarah Malang*" diakses melalui alamar <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> pada tanggal 30 juli 2017

menjadi air yang bisa terurai, dengan harapan nantinya Membuang Air Besar (BAB) tidak ke sungai. Sehingga sanitasi pribadi bisa diprogramkan dengan baik.¹⁵

Berdasar uraian potensi dan permasalahan terkait pengelolaan limbah cair domestik di Kota Malang tersebut maka diperlukan kegiatan atau upaya yang dapat mengurangi resiko atau dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan air limbah yang belum baik atau maksimal. Kegiatan tersebut diturunkan dalam bentuk program-program pemerintah yang berasal dari tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sub sektor limbah domestik di Kota Malang. Dimana Tujuan pengelolaan Air limbah domestic Kota Malang adalah seluruh wilayah Kota Malang memiliki akses terhadap prasarana pengelolaan air limbah secara layak dan berkelanjutan. Sedangkan sasarannya adalah: Cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Malang mencapai 100 % (off-site 85% dan 15% on-site) pada tahun 2021.¹⁶

Program SPBM merupakan salah satu komponen Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Pemerintah Kota Malang, DPUPR . 14 Maret 2017 “*DPUPR, Pembuangan Sanitasi di Kota Malang kebanyakan berujung di Sungai*” diakses melalui alamat <http://dpupr.malangkota.go.id/dpupr-pembuangan-sanitasi-kota-malang-kebanyakan-berujung-sungai/> pada tanggal 30 juli 2017

¹⁶ Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kota Malang 2016 . diakses dari alamat http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d6rzjD-OS3MJ:ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/newssk/kota.malang/Bab%25204_SS_K_250916%252020161005.docx+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id pada tanggal 30 juli 2015

Program SPBM USRI dilaksanakan secara bertahap di 1.350 lokasi sasaran pada 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Lokasi sasaran kegiatan SPBM USRI adalah kelurahan yang terletak di daerah perkotaan dan memiliki ciri-ciri daerah kota diutamakan yang berada di zona kritis atau merah serta mendukung program sanitasi di daerah perkotaan tersebut. Pada pelaksanaannya, program SPBM USRI menggunakan lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak serta kinerja yang baik di dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat. Salah satu ruang lingkup Program SPBM USRI adalah penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dengan sistem perpipaan dan/atau kombinasi MCK dan perpipaan.¹⁷

Dengan dibangunnya IPAL komunal yang tersambung ke jamban-jamban keluarga masyarakat, maka dapat mengakhiri periode membuang limbah rumah tangga dari dapur dan kotoran dari WC langsung ke sungai atau septic tank tidak kedap air. Bahkan, keberadaan IPAL akan meringankan warga dalam membiayai pembangunan WC keluarga.¹⁸ Diharapkan dengan adanya dukungan berupa dana pinjaman dari *Asian Development Bank* dalam pelaksanaan program *Urban*

¹⁷ Kementerian PU, 2013, *Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 2013*, Jakarta: Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI.

¹⁸ Kementerian PU, 2 Desember 2014, *Setelah Ada IPAL Bikin WC Jadi Lebih Murah*, <http://ciptakarya.pu.go.id/spbm-usri/bagus/Setelah-Ada-IPAL-Bikin-WC-Jadi-Lebih-Murah>

Sanitation and Rural Infrastructure Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Indonesia maka krisis sanitasi di Indonesia secara perlahan-lahan dapat teratasi.

Berdasarkan paparan di atas maka hal yang menarik adalah bahwa Indonesiahingga saat ini masih mengandalkan pinjaman atau hutang luar negeri sebagai modal dalam pembiayaan pembangunan nasional. Data yang dikutip dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Juni 2016, Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri sebesar Rp.735,43 triliun. Secara bilateral, Jepang (Rp.228,05 triliun), Prancis (Rp.24,2 triliun), dan Jerman (Rp.19,81 triliun) masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia sebesar Rp.219,82 triliun, Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar Rp.115,7 triliun, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp.8,87 triliun.¹⁹

Pada saat ini, perkembangan hutang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan. Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa pada Januari 2015 hutang luar negeri Indonesia mencapai 298,6 miliar dollar AS. Porsi ini naik 2,05 persen dibandingkan hutang luar negeri Indonesia di bulan Desember 2014 sebesar 292,6 miliar dollar AS. Secara keseluruhan hutang luar negeri Indonesia tumbuh 10,1 persen dibanding periode yang sama di tahun 2014. Peningkatan hutang luar negeri tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat tergantung pada utang luar negeri.

¹⁹ Netral News, 3 Agustus 2016, *Ini Pemberi Pinjaman Terbanyak untuk Indonesia*, <http://netralnews.com/news/ekonomi/read/17244/ini.pemberi.utang.terbanyak.untuk.indonesia>

Indonesia merupakan negara dengan anggaran belanja yang defisit, atau anggaran belanja yang tidak seimbang.

Defisit berarti tingkat pengeluaran lebih besar dari pada tingkat pendapatan. Hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia kekurangan modal. Dalam hal ini modal (dana) berguna sebagai modal pembangunan. Untuk menutupi anggaran belanja yang tidak seimbang tersebut Indonesia melakukan hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan suatu sarana yang baik untuk meningkatkan roda perekonomian nasional, karena dengan hutang luar negeri yang stabil dan sehat maka roda perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Hal ini didukung pula dengan semakin banyaknya aktivitas sektor produksi baik pemerintah ataupun swasta dengan adanya bantuan dana dari luar negeri tersebut. Namun, jika hutang luar negeri yang tak terkendali maka akan membawa dampak yang kurang baik dengan stabilitas perekonomian nasional ke depannya.²⁰

Oleh karena itu, perlu diketahui sejauhmana implementasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang pada pemenuhan program penanggulangan sanitasi yang buruk di Kota Malang. Implementasi program pun mencakup banyak aspek yang mengikuti. Baik itu aspek yang berupa produksi program, perencanaan program, pembiayaan program, karakteristik program, pencapaian program, dan seluruh hal yang saling berkaitan pada program menjadi poin indikator yang penting untuk diteliti oleh penulis. Hal ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi pada indikator apa saja yang

²⁰Miftahul Hidayah, 1 April 2015, *Utang Luar Negeri: Masalah atau Solusi Baru?*, http://www.kompasiana.com/www.mifta.com/utang-luar-negeri-masalah-atau-solusi-baru_5554610f739773281490552b

mendukung terwujudnyaprogram *Sanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah(USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Implementasi Program *Sanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah(USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang pada tahun 2013 dan 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi kebijakan pada Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang pada tahun 2013 dan 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pada Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Indonesia dan program berkelanjutan skala besar dalam mendukung terwujudnya implemtasi kebijakan atas Program *Sanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah (USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan

untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuannya pada masalah yang sama.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Eris Praghina,²¹ melakukan peneliti dengan judul “Kontribusi Pinjaman ADB Terhadap Program Pembangunan Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2004-2009”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Penyusunan strategi program ADB untuk Indonesia didasarkan pada strategi yang disusun oleh Pemerintah. Namun, ADB tetap memiliki pertimbangan pada area operasional mana pinjaman diprioritaskan berdasarkan analisis ADB terhadap hambatan pembangunan Indonesia.
2. Untuk periode 2004-2009, sektor hukum, pengelolaan perekonomian dan kebijakan publik menjadi *concern* ADB terhadap Indonesia yang disandarkan pada analisis terhadap hambatan pembangunan Indonesia. Pada sektor ini, *Development Policy Support Program* yang dibiayai bersama ADB, *World Bank* dan Pemerintah Jepang menjadi fitur penting pada keseluruhan program ADB untuk Indonesia karena kerangka program tersebut mewakili agenda reformasi pemerintah yang saat itu baru terpilih.

²¹Eris Praghina, 2011, Kontribusi Pinjaman ADB Terhadap Program Pembangunan Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2004-2009, *Tesis*, FISIP Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

3. Dari sisi jumlah pinjaman yang selama ini digelontorkan ADB, Sektor pengelolaan sektor publik dan sektor keuangan berada dalam 5 sektor alokasi terbesar. Hasil utama yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang mendukung, mengembangkan sektor keuangan yang selama ini tertinggal dan mengembangkan kapasitas desentralisasi yang tidak memadai di tengah lingkungan hukum dan peradilan yang tidak stabil.
4. Namun, sektor transportasi dan komunikasi, suplai air dan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, industri dan perdagangan kurang mendapatkan perhatian dengan minimnya alokasi pinjaman pada sektor tersebut, padahal sektor-sektor itulah yang berpotensi memberikankontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang diikuti perluasan kesempatan kerja.
5. Pinjaman yang dialokasikan pada sektor transportasi dan komunikasi, lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas jalan dan pelabuhan, yang notabene tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan fasilitas transportasi massal. Di sisi lain, pinjaman tersebut lebih membuka lebar kesempatan berkembangnya industri otomotif dengan dampak jangka panjang pada kerusakan lingkungan.

Kesamaan antara penelitian Eris Praghinatersebut dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang pinjaman ADB. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji pinjaman ADB dalam Program Pembangunan Pemerintah Dalam RPJMN Periode 2004-2009, sedangkan penelitian sekarang mengkaji implementasi dari pinjaman ADB dalam Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang.

Indah Sakti Pratiwi,²² melakukan peneliti dengan judul “Intervensi Bank Dunia (*World Bank*) Dalam Privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia (Studi Kasus: Privatisasi PAM Jaya Jakarta)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Bank Dunia; *pertama*, Bank Dunia menggunakan struktur keuangan untuk melakukan intervensi pembuatan program-program pengelolaan sumber daya air yang berujung pada pembuatan UU No.7 Tahun 2004 Tentang Air. *Kedua*, Bank Dunia dan IMF memiliki informasi ataupun data tentang kondisi air di Indonesia yang sangat buruk sehingga sangat membutuhkan peranan sektor swasta, disinilah kemudian Bank Dunia melakukan intervensi pembuatan UU No. 7 Tahun 2004, tentang pentingnya privatisasi air di Indonesia. *Ketiga*, terbukti penggunaan struktur keuangan melalui instrumen fasilitas kredit untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan elit “aktor politik” peran ini yang kemudian dimainkan oleh Bank Dunia untuk menjalankan privatisasi air.
2. Kinerja teknis PAM Jaya sebelum privatisasi lebih baik daripada setelah privatisasi, hal ini ditunjukkan dengan hasil laju pertumbuhan produksi air PAM, volume air yang terjual, UFW, dan cakupan pelayanan yang lebih kecil daripada setelah privatisasi.

²²Indah Sakti Pratiwi, 2013, Intervensi Bank Dunia (World Bank) Dalam Privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia (Studi Kasus: Privatisasi PAM Jaya Jakarta), *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 4: 1133-1140.

Kesamaan antara penelitian Indah Sakti Pratiwi tersebut dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang pinjaman dari organisasi internasional. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji pinjaman dari Bank Dunia dalam program pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang mengkaji implementasi dari pinjaman ADB dalam Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang.

Indah Maisuri,²³ melakukan penelitian dengan judul “Peran *International Monetary Fund* (IMF) Dalam Pemulihan Perekonomian *Seychelles* Tahun 2008 - 2013”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun program reformasi ekonomi makro yang dibawa IMF cukup berhasil memulihkan perekonomian *Seychelles*, namun dengan melakukan pinjaman kepada IMF maka *Seychelles* justru menambah utangnya. Dampak negatif dari bantuan ekonomi seperti pemberian pinjaman berupa utang membuat *Seychelles* akan mengalami ketergantungan ekonomi. Bila sudah mengalami ketergantungan ekonomi maka dengan mudahnya *Seychelles* akan dikendalikan oleh pihak-pihak dibalik IMF yang memberikan peminjaman utang, salah satu bentuk intervensinya adalah dengan merubah kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah *Seychelles*. Dalam program yang disepakati oleh *Seychelles* tersebut sangat terlihat intervensi IMF dan kepentingan ekonomi liberalisnya. Ditambah pula *Seychelles* yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif melebihi 1 juta km² dari

²³Indah Maisuri, 2015, Peran *International Monetary Fund* (IMF) Dalam Pemulihan Perekonomian *Seychelles* Tahun 2008 - 2013, *Journal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, Vol. 2, No. 2, Oktober: 1-13.

Samudera Hindia menjadi sumber minyak potensial yang belum tereksplorasi bagi pihak-pihak yang berkuasa di balik IMF.

Kesamaan antara penelitian Indah Maisuri tersebut dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang pinjaman dari organisasi internasional. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji pinjaman dari IMF dalam program pemulihan perekonomian di negara *Seychelles*, sedangkan penelitian sekarang mengkaji implementasi Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang.

Berikut ini disajikan rangkuman dari hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1. Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	Eris Praghina (2011)	Kontribusi Pinjaman ADB Terhadap Program Pembangunan Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2004-2009	Deskriptif Kualitatif	Dari pinjaman yang digelontorkan ADB, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang mendukung, mengembangkan sektor keuangan dan kapasitas desentralisasi. Sektor transportasi dan komunikasi, suplai air dan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, industri dan perdagangan kurang diperhatikan dengan minimnya alokasi pinjaman pada sektor tersebut, padahal berpotensi memberikankontribusi

				<p>pada pertumbuhan ekonomi yang diikuti perluasan kesempatan kerja. Sektor transportasi dan komunikasi lebih difokuskan pada pengembangan fasilitas jalan dan pelabuhan yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan fasilitas transportasi massal.</p>
2.	<p>Indah Sakti Pratiwi (2013)</p>	<p>Intervensi Bank Dunia (<i>World Bank</i>) Dalam Privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia (Studi Kasus: Privatisasi PAM Jaya Jakarta)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Bentuk intervensi Bank Dunia berupa menggunakan struktur keuangan untuk melakukan intervensi pembuatan program-program pengelolaan sumber daya air yang berujung pada pembuatan UU No.7 Tahun 2004 Tentang Air. Selain itu, penggunaan struktur keuangan melalui instrumen fasilitas kredit untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan elit “aktor politik” untuk menjalankan privatisasi air. Dampaknya kinerja teknis PAM Jaya sebelum privatisasi lebih baik daripada setelah privatisasi, hal ini ditunjukkan dengan hasil laju pertumbuhan produksi air PAM, volume air yang terjual, UFW, dan cakupan pelayanan yang lebih kecil daripada setelah privatisasi.</p>

3.	Indah Maisuri (2015)	Peran <i>International Monetary Fund</i> (IMF) Dalam Pemulihan Perekonomian <i>Seychelles</i> Tahun 2008-2013	Deskriptif Kualitatif	Meski program reformasi ekonomi-makro yang dibawa IMF cukup berhasil memulihkan perekonomian <i>Seychelles</i> , namun dengan melakukan pinjaman kepada IMF maka <i>Seychelles</i> justru menambah utangnya. Dampak negatif dari bantuan ekonomi seperti pemberian pinjaman berupa utang membuat <i>Seychelles</i> akan mengalami ketergantungan ekonomi, sehingga dengan mudah <i>Seychelles</i> akan dikendalikan oleh pihak-pihak dibalik IMF. Salah satu bentuk intervensinya adalah dengan merubah kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah <i>Seychelles</i> .
----	----------------------	---	-----------------------	--

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Studi implementasi kebijakan yang secara sederhana didefinisikan sebagai proses penerjemahan kebijakan menjadi sebuah tindakan tidak muncul dalam waktu yang singkat.²⁴ Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* implementasi kebijakan yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat

²⁴ H. Pulzl dan O. Treib, 2007, *Implementing Public Policy: Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group, hal. 89.

pusat. Salah satu ilmuwan yang menganut dan aliran *top down* adalah George C. Edward III. Model implementasi dari George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*.²⁵ Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Edward III menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.²⁶

a. Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga

²⁵ Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal. 149.

²⁶ Riant Nugroho, 2012, *Public Policy*. Jakarta: Gramedia, hal. 191.

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi.²⁷

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.²⁸

²⁷ Joko Widodo, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 97.

²⁸ Riant Nugroho, *Op.cit.*, hal. 191.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan Edward III.²⁹ Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.³⁰

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar

²⁹ Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita, hal. 177.

³⁰ Riant Nugroho, *Op.cit.*, hal. 191.

kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.³¹

2. Sumber daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif.³² Menurut Edward III, sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.³³
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

³¹*Ibid*, hal. 191.

³²*Ibid*, hal. 447.

³³ Leo Agustino, *Op.cit.*, hal. 158.

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.³⁴

- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.³⁵
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.³⁶

3. Sikap atau Disposisi

Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors)

³⁴*Ibid*, hal. 158.

³⁵*Ibid*, hal. 159.

³⁶*Ibid*, hal. 159.

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.³⁷

Menurut Edward III bahwa banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada

³⁷ Joko Widodo, *Op.cit.*, hal. 104.

umumnya tidak sangat tampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi adalah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada.³⁸

Edward III mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang menjadi perhatiannya mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.³⁹
- b. Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya

³⁸ Budi Winarno, *Op.cit.*, hal. 194.

³⁹ Leo Agustino, *Op.cit.*, hal. 152.

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.⁴⁰

4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Edward III menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.⁴¹

a. *Standard Operational Procedure* (SOP).

Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (*standard operational procedure*). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP

⁴⁰ Leo Agustino, *Op.cit.*, hal. 153.

⁴¹ *Ibid*, hal. 153.

juga menyeragami tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.⁴²

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan.⁴³

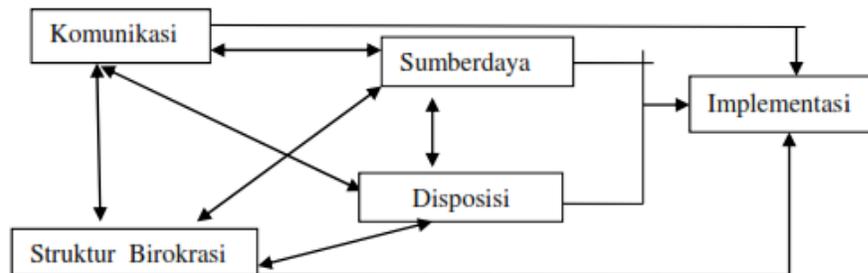
Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karenatanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. *Kedua*, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan pelaksana mungkin juga akan menghambat perubahan. Bila suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka

⁴²*Ibid*, hal. 154.

⁴³*Ibid*, hal. 154.

badan tersebut akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.⁴⁴

Gambar 2.1. Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: George C. Edward III dikutip oleh Leo Agustino⁴⁵

Secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Artinya bahwa implementasi dari suatu kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena terdapat banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis implementasi dana pinjaman program *UrbanSanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah(USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang 2013-2014 dengan menggunakan model atau konsep implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini memiliki keunggulan yakni dapat mewakili model-model implementasi yang lain karena

⁴⁴*Ibid*, hal. 154.

⁴⁵*Ibid*, hal. 150.

adanya beberapa kesamaan variabel, mudah dipahami karena modelnya sederhana dan sering dipergunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan-kebijakan oleh beberapa peneliti dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi kebijakan atau program di berbagai tempat dan waktu.

Dalam model implementasi oleh George C Edward III ini menjelaskan bahwa masing-masing dari variabel yang terdapat pada implementasi memiliki hubungan yang saling berketerkaitan. Terdapat 4 variabel dalam model implementasi ini. Yakni komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya, dan disposisi/sikap. Pada keempat komponen itu memiliki keterkaitan langsung dengan bentukan implementasi. Namun bagaimana mereka memiliki keterkaitan masing-masingnya. Dimulai dr komunikasi dan struktur birokrasi memiliki hubungan dalam pengadaan hubungan aktor institusi dan aktor pelaku berupa verbal. Hubungan keduanya masuk dalam kesepahaman atas bagaimana korelasi masing-masingnya. Untuk menjalankan sebuah program maka terdapat unsur komunikasi untuk melancarkan kesepahaman baik itu berupa persiapan hingga ke tahapan pelaksanaan.

Komunikasi dan sumberdaya sendiri berketerkaitan atas komponen fisik. Dimana setiap sumberdaya fisik yang menjalankan program akan melakukan jenis tindakan komunikasi untuk mencapai kesepakatan dan pemenuhan program sesuai dengan tujuan dan kondisi masing-masingnya.

Begitu juga pada sumberdaya dan disposisi, dimana masing-masing komponen sumberdaya fisik sebuah program pengimplementasian akan mengambil disposisi yg bukan hanya verbal sebagai bentuk perwujudannya namun juga bisa

mengarah pada pemenuhan SOP hingga pada sikap untuk menjalankan proses dari awal hingga akhir dengan strategi dan sikap yang disesuaikan dengan bentuk tersebut.

Disposisi sendiri akan lari pada struktur birokrasi yang bisa dikatakan legitimasi tertinggi untuk menjalankan proses program. Adanya SOP and fragmentasi dalam pemenuhan disposisi/sikap aktor pelaku program menjadikan bentuk prosedural bagaimana program menjalankan visi misinya untuk masuk dalam pembentukan program yang baik.

Komunikasi dan disposisi sendiri menjelaskan pada bagaimana aktor menjalankan perlakuan baik sifatnya secara fisik.verbal dan komponen2 lainnya. Dari prosedural aktor ini akan mengarah pada bentuk apa yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan program.

Pada dasarnya tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan-pilihan yang harus dipilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri.⁴⁶ Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada lembaga atau organisasi PNPM Mandiri Kota Malang sebagai implementor kebijakan yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi terutama sumber daya, dan struktur birokrasi, termasuk disposisi dan komunikasi. Adapun model implementasi kebijakan yang paling detail membahas tentang hal tersebut adalah model yang diajukan oleh George C. Edward

⁴⁶ Riant Nugroho, *Op.cit.*, hal. 454.

III. Artinya sukses tidaknya implementasi kebijakan program USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang sangat bergantung terhadap organisasi pelaksana (implementor) yang dalam penelitian ini adalah PNPM Mandiri Kota Malang yang dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung dari komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi dari organisasi tersebut.

2.3 Definisi Operasionalisasi

Berdasarkan ulasan pada bagian kerangka konseptual, maka hubungan dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai implementasi dana pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) pada program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah (USRI-IPAL) Komunal di Kota Malang. Peneliti menggunakan konsep atau model implementasi kebijakan atau program model George C. Edward III sebagai alat analisis dikarenakan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kementerian PU Dirjen Cipta Karya selaku implementor yang mengimplementasikan dana pinjaman dari ADB dalam program USRI-IPAL Komunal, khususnya di Kota Malang.

Tabel 2.1. Variabel dan Indikator Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi Komunikasi	1. Transmisi pada program USRI IPAL oleh PU dalam koordinasi dengan donor dan struktur organisasi. 2. Kejelasan dalam program USRI IPAL di Kota Malang 3. Konsistensi komunikasi baik internal maupun eksternal dalam implementasi Dana

			Pinjaman ADB pada Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang.
	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. fasilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kuantitatif dan Perkembangan Kualitatif staf dalam program USRI IPAL. 2. Informasi dalam penyusunan hingga ke tahap implementasi program USRI IPAL di Kota Malang 3. Wewenang dalam menjalankan program USRI IPAL Komunal Kota Malang 4. Fasilitas dalam implementasi Dana Pinjaman ADB pada Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang
	Sikap atau Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan birokrasi 2. insentif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Birokrasi dan sikap yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian program 2. Sikap implementor terkait insentif tunjangan dana dan keperluan kebutuhan dalam implementasi Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. fragmentasi 	Karakteristik birokrasi berupa SOP dan fragmentasi dalam implementasi Dana Pinjaman ADB pada Program USRI-IPAL Komunal di Kota Malang

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel definisi operasionalisasi di atas terdiri dari konsep yang diturunkan menjadi variabel dan indikator. Konsep yang peneliti gunakan adalah

implementasi kebijakan *top down* yang diturunkan menjadi empat bagian, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut merupakan komponen-komponen yang digunakan dalam implementasi kebijakan atau program berdasarkan konsep dari George C. Edward III. Pada Variabel Komunikasi telah dijelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang menjadi indikator dimana transmisi berfungsi untuk mengendalikan program dengan mencapai koordinasi dengan berbagi elemen yang berkontribusi atas implementasi program USRI IPAL Komunal Malang, disamping itu, Kejelasan elemen program baik tujuan, fungsi, sasaran, harapan dan elemen pelaksanaan baik saat berlangsungnya program maupun setelah program dilaksanakan. Kesemua itu menjadi tolok paling penting bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini mampu memberikan sinergi yang tepat untuk masyarakat sasaran. Indikator lainnya adalah konsistensi komunikasi yang ditujukan pada hubungan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk kelangsungan program dengan baik.

Merujuk pada variabel sumber daya dimana memiliki empat komponen indikator yaitu: Staf, Informasi, wewenang, dan fasilitas. Untuk menjelaskan staf adalah komponen sumber daya manusia yang berfungsi untuk menjalankan program baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap efek yang didapat setelah pelaksanaan. Program ini meminta banyak staf untuk mencapai target daerah sasaran, masyarakat, donor atau elemen lainnya yang langsung ke arah hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya, pada tahapan informasi dirasa memang sangatlah

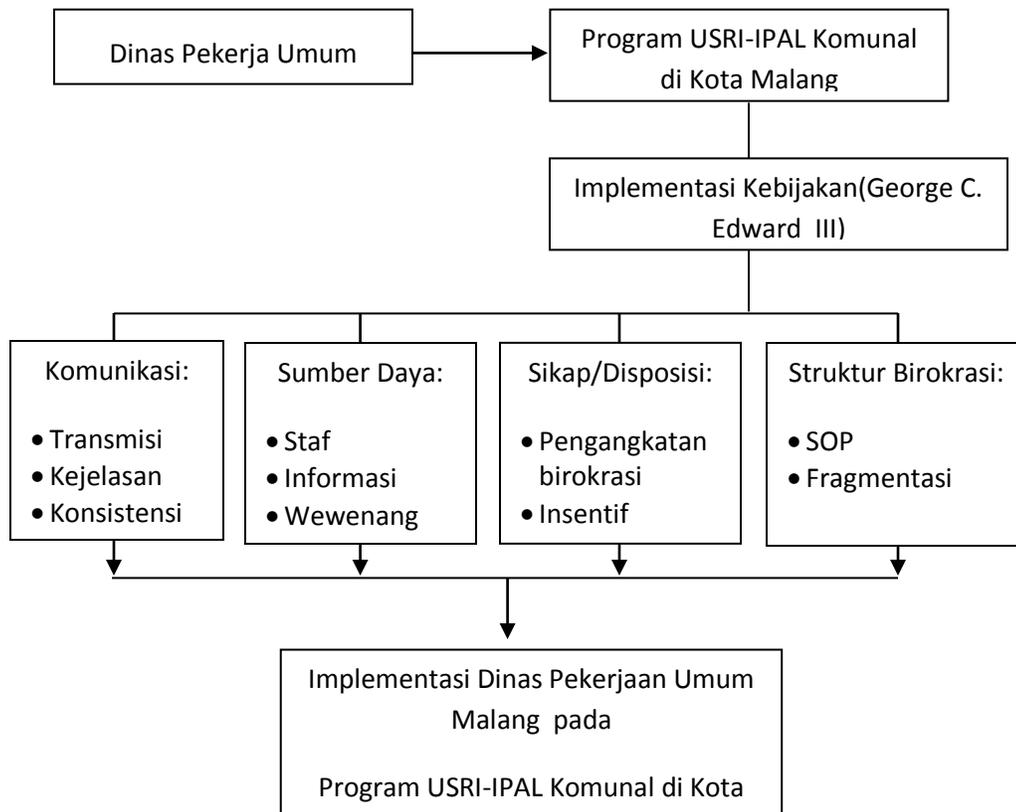
penting karena informasi ini juga bisa dikatakan sebagai hasil yang didapatkan oleh staf berupa kualitas atau kegiatan abstrak namun sangat berperan besar. Agar informasi dan staf memiliki harmonisasi yang bagus dan sesuai, maka komponen wewenang menjadi indikator yang mendukung keduanya sehingga wewenang ini memiliki fungsi di beberapa departemen perencanaan dan pelaksanaan program, dalam hal ini saat kesemuanya sudah menyusun jadi komponen yang sama, maka keberadaan fasilitas adalah akhir untuk menyempurnakan kondisi dan tatanan keberlangsungan implementasi program USRI IPAL Komunal Malang.

Berlanjut pada variabel yang mengarah pada aksi setelah amunisi sebelumnya sudah terkumpul dengan baik, variabel ini adalah sikap dan disposisi cenderung ke bentuk indikator yang berhubungan dengan birokrasi, birokrasi di sini mengarah pada isu bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan akan berhadapan dengan pihak birokrasi untuk legitimasi atau penunjang lainnya. Dari kondisi ini juga bisa mengarah pada insentif yang merupakan penyokong kelangsungan dana untuk implementasi program USRI IPAL Komunal di Kota Malang.

Variabel yang terakhir lebih mengarah pada struktur birokrasi dimana birokrasi dalam hal ini berbeda dengan variabel birokrasi yang dijelaskan di paragraph sebelumnya. Pada pembahasan ini birokrasi lebih ke struktur organisasi yang menjelaskan adanya bentuk SOP suatu jenis kerja selanjutnya baik itu di tahap persiapan hingga ke pelaksanaan. Unsure fragmentasi sendiri di dalam program USRI IPAL mengarah pada pembagian tanggung jawab akan kebijakan di setiap unit program USRI IPAL.

2.4 Alur Pemikiran

Gambar 2.2
Alur Pemikiran Implementasi Program
USRI-IPAL Komunal di Kota Malang



Pada alur pemikiran yang dipahami penulis adalah Permasalahan bermuncul dari aktor utama yang memegang permasalahan sanitasi di Kota Malang yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang yang berkontribusi langsung pada tahap baik mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengevaluasian program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* serta Instalasi Pipa Air Limbah Komunal Kota Malang yang menjadi program primadona dari PNPM Mandiri untuk mengatasi dan menyelesaikan

permasalahan sanitasi berbasis perkotaan yang sangat krusial menimbulkan efek yang buruk jika tidak diatasi dengan segera.

Melalui pemenuhan implementasi program USRI IPAL Komunal ini menjadi fokus penting pada kepentingan kebijakan yang meliputi beberapa aktor, sasaran, tujuan, hingga pencapaian yang diharapkan. Implementasi program itu memunculkan pemahaman bahwa konsep dari Implementasi Kebijakan oleh George C Edward III yang berisi bahwa beberapa variabel yang mendukung terbentuknya konsep tersebut itu meliputi : Komunikasi, Sumber daya, Sikap/Disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk masing masing komponen variabel tersebut pun terbagi ke beberapa indikator dimana pada variable komunikasi meliputi transmisi, kejelasan serta konsistensi. Ketiganya merupakan keterkaitan langsung pada hubungan baik itu sifatnya internal maupun eksternal untuk menjalankan program dengan baik. Variabel yang kedua adalah sumber daya yang mencakup ketersediaan staf dalam program, informasi yang tersedia dan wewenang. Berlanjut pada variabel yang ketiga yaitu Sikap/Disposisi yang mengarah pada konten pengangkatan birokrasi dan insentif pegawai. Dan variabel yang terakhir mengacu pada struktur birokrasi dimana berketerkaitan dengan indikator SOP dan fragmentasi dalam penjelasannya. Kesemua pola pemikiran itu berujung pada bagaimana implementasi kebijakan pada program USRI IPAL di Kota Malang pada tahun 2013 dan 2014 yang menjadi inti dari ide pemikiran penulis dalam menjabarkan kasus yang menarik untuk diteliti oleh penulis.

2.5 Argumen Utama

Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dan *Asian Development Bank* (ADB) melakukan kesepakatan pinjaman (*loan agreement*) terkait dengan upaya perbaikan kondisi sanitasi di Indonesia pada tahun 2013-2014. Implementor dalam upaya ini adalah Kementerian PU Dirjen Cipta Karya dan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) melalui program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure Instalasi Pengolahan Air Limbah (USRI-IPAL) Komunal*, termasuk di wilayah Kota Malang. Dalam implementasi kebijakan atau program tersebut terdapat transmisi komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terkait, terdapat petunjuk pelaksanaan yang jelas, dan perintah pelaksanaan harus konsisten antara PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) dan Kementerian PU Dirjen Cipta Karya dengan *Asian Development Bank* (ADB). Dalam pelaksanaan program tersebut, implementor telah berupaya melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki yakni staf yang memadai, tersedia informasi terkait cara pelaksanaan dan kompetensi pelaksana, tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, dan tersedia fasilitas yang mendukung.

Terkait aspek sikap atau disposisi, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan dan kepentingan warga masyarakat, serta tersedia insentif yang mendorong implementor menjalankan perintah dengan baik. Adapun dalam hal struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program tersebut terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga implementor memiliki keseragaman dalam bekerja, dan adanya

fragmentasi yakni pembagian tanggungjawab yang jelas di antara organisasi yang terlibat yakni PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan *Asian Development Bank* (ADB).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁷ Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi dari dana pinjaman ADB pada Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang periode 2013-2014.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ilmiah ini ruang lingkup penelitian periodisasi atau *timeline* pada tahun 2013 hingga 2014. Pemilihan periode ini dikarenakan pada periode tersebut Pemerintah Indonesia dana pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) dalam rangka menyelenggarakan program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* Instalasi Pengolahan Air Limbah (USRI-IPAL) Komunal di 34 kabupaten/kota di Indonesia, dan salah satunya adalah di Kota Malang. Program tersebut bertujuan untuk mendukung Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) khususnya penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi Instalasi

⁴⁷Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi. Revisi. Jakarta. Rineka Cipta, hal 3.

Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dengan system perpipaan/atau kombinasi MCK dan perpipaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka (*library research*), yakni dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan melakukan analisa terhadapnya. Literatur tersebut dapat berupa dokumen, buku, jurnal, surat kabar atau majalah dan website di internet, termasuk laporan-laporan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang bersumber dari berbagai literature atau referensi dan data hasil olahan yang ditemukan dari bermacam-macam sumber.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ilmiah ini menggunakan data kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dihasilkan dalam data deskriptif mengenai kata-kata tertulis,⁴⁸ yang mana data tersebut didapat melalui literatur kepustakaan dengan mengkaji fenomena yang dijadikan masalah dalam objek penelitian ilmiah ini. Setelah itu, penulis akan melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu mencoba mengkorelasikan antara teori atau konsep yang digunakan dengan kondisi fenomena yang dianalisis. Melalui hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan apakah teori

⁴⁸Bagong Suyanto, 2006, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana, hal 166.

yang dipakai tersebut mampu menawarkan dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah ini.

3.5 SistematikaPenulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan meliputi :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan yang akan diteliti, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II berisi tentang kerangka konseptual yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, definisi operasionalisasi yang akan digunakan, kemudian alur pemikiran dan selanjutnya adalah argument utama.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV berisi tentang gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Program USRI IPAL

BAB V berisi tentang pembahasan mengenai implementasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota malang pada program sanitasi berbasis usri ipal komunal

BAB VI berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEKERJAAN UMUM DAN PROGRAM USRI IPAL

4.1 Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum merupakan bagian dari kementerian pemerintah Indonesia yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimana sebelum terbentuknya lembaga ini lebih disebut sebagai “Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah” pada tahun 1999-2000 dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” di tahun 2000 hingga 2004. Dalam sejarahnya Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda " Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "*Waterstaat swerken*". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken.⁴⁹

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU.

Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.

⁴⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia “Sejarah Pekerjaan Umum, dari Masa Ke Masa” PU-Net. Diakses dari alamat <http://www.pu.go.id/content/show/34/Dari-Masa-Ke-Masa> pada tanggal 18 Juni 2017

⁵⁰ ibid

2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu:⁵¹

1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw.
3. Departemen Van Scheepvaart.

Dalam hal ini tergambar jelas atas penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut : Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut

⁵¹ ibid

mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.⁵²

⁵² Profil Pekerjaan Umum, Sejarah dari Masa ke Masa. Diakses dari alamat <http://www.pu.go.id/content/show/34/Dari-Masa-Ke-Masa> pada tanggal 18 juni 2017

4.1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”.⁵³

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;

⁵³ Tugas dan Fungsi Pekerjaan Umum. Di akses dari alamat <http://www.pu.go.id/content/show/14/Tugas-dan-Fungsi> pada tanggal 18 Juni 2017

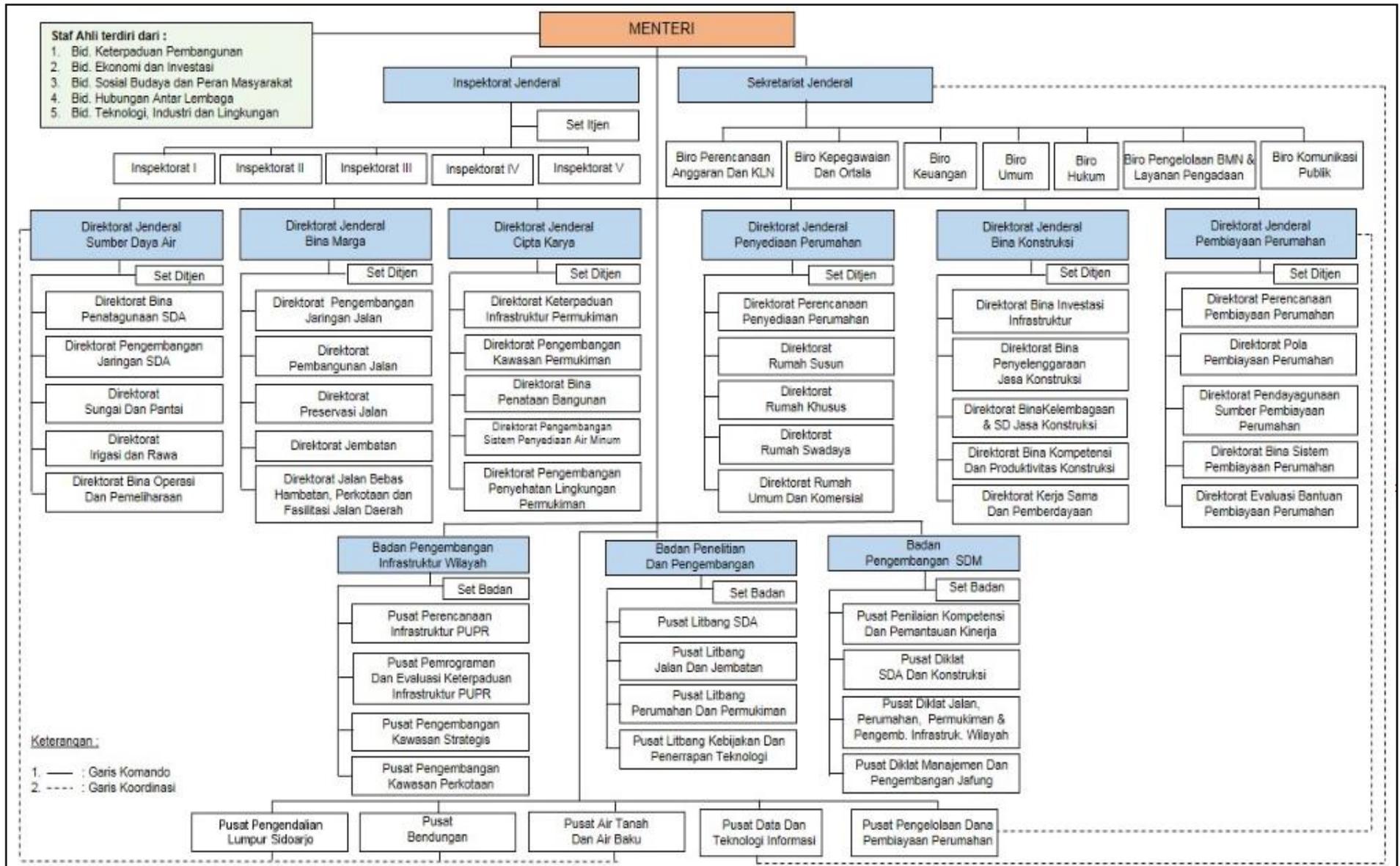
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.1.2 Struktur Organisasi Pekerjaan Umum⁵⁴

Pada Struktur organisasi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ini dipimpin oleh Menteri dengan dilanjutkan oleh Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Namun dalam keselarasan dengan program kerja atau bahkan pemenuhan kebijakan dari menteri maka struktur organisasi ini menggunakan sistem bahwa Menteri dibantu langsung dengan Staf Ahli yang mewadahi dalam lima bidang sekaligus dengan keahlian yang berbeda-beda. Staf ahli tersebut meliputi: Bidang Keterpaduan Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Investasi, Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan. Staf Ahli tersebut terlepas dari pemenuhan bawahan dari menteri yaitu inspektorat dan sekretariat jenderal. Keduanya mewadahi bidang dan divisi masing masing. Untuk Inspektorat Jenderal membawahi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sedangkan untuk Sekretaris Jenderal sendiri membawahi Direktorat Jenderal Penyediaan perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Kesemua Direktorat Jenderal tersebut mengurus Badan Pengembangan Instruktur Wilayah, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan SDM.

⁵⁴ Profil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “ Struktur organisasi” diakses dari alamat website <http://www.pu.go.id/content/show/15/Organisasi> pada tanggal 18 Juni 2017

Masing masing structural tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda beda namun tetap dalam koridor visi dan misi yang telah dicanangkan kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat serta visi dan misi dari program itu sendiri. Bagan struktural organisasi ini dijelaskan secara detail seperti gambar di bawah ini:



Sumber : PU-Net, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

4.1.3 Produk- Produk Pekerjaan Umum

a. Rencana Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif akan menjadi trend ekonomi dunia dalam beberapa tahun mendatang. Stagnasi pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, mendorong seluruh dunia untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam berkehidupan ekonomi yang memaksimalkan nilai tambah dari suatu produk barang dan jasa dalam rangka keberlanjutan kehidupan dan peradaban manusia.

Indonesia dengan berbagai potensi yang dimiliki harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan trend ekonomi dunia tersebut. Untuk itu, Pemerintah melalui intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 (Inpres 6/2009) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mencoba mempersiapkan diri dengan mengkoordinir seluruh struktur pemerintahan yang ada untuk secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Kementerian PU Tahun 2010-2014 ini disusun sesuai dengan perintah Inpres 6/2009 yang salah satunya menginstruksikan kepada Menteri PU untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kementerian PU.⁵⁵

⁵⁵Produk Pekerjaan Umum, Rencana Ekonomi Kreatif . diakses dari alamat website <http://www.pu.go.id/content/show/178/rencana-ekonomi-kreatif#> pada tanggal 18 Juni 2017

Dokumen ini merangkum rencana aksi yang dicanangkan oleh Kementerian PU untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dalam bidang pemerintahan yang ditangani Kementerian PU (sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Perpres 24/2010), serta penugasan spesifik dari Presiden kepada Menteri PU dalam pengembangan ekonomi kreatif (sesuai Inpres 6/2009).

Rencana aksi yang dicanangkan merupakan penajaman terhadap Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU Tahun 2010-2014, khususnya dalam mendukung Implementasi dari Rencana Pengembangan Ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015 yang telah disusun dokumennya oleh Kementerian Perdagangan.

b. Standart Nasional ⁵⁶

Bentuk Standart Nasional telah diatur langsung oleh Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) yang terdiri oleh beberapa konsentrasi yaitu PUSAIR untuk Pusat Litbang pada Sumber Daya Air, PUSJATAN (Pusat Litbang Jalan dan Jembatan) , PUSKIM (Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman), dan PKPT (Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi). Masing-masing dari beberapa konsentrasi tersebut menjadikan ketentuan dan standarisasi pada pencapaian dari beberapa sektor pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum.

⁵⁶ Balitbang, Hadirkan Solusi, Seiring Inovasi . diakses dari alamat website <http://litbang.pu.go.id/litbang/profile> pada tanggal 18 Juni 2017

c. Informasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Informasi anggaran ini meliputi beberapa bentuk yang digunakan sebagai acuan dan juga laporan untuk memberikan pelayanan terbaik dan proses pekerjaan yang tepat sasaran. Beberapa informasi tersebut meliputi Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat dengan periode 5 tahun yang berisi mengenai program dan kegiatan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai penjabaran dari renstra untuk setiap periode satu tahun. Renstra juga digunakan untuk acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi internal dan eksternal, hal ini tak lain juga digunakan sebagai konsistensi sehingga sasaran pembangunan infrastruktur bisa berjalan terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, informasi kedua yang menjadi program dari PU merupakan Rencana Kerja Kementerian Lembaga atau biasa disebut dengan Renja-KL yang mana dalam informasi anggaran ini menjelaskan secara detail bagaimana program kerja berjalan dan ditujukan langsung pada tujuan serta visi misi. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan segala pencapaian dalam pembangunan nasional dan

memudahkan beberapa stakeholder untuk mampu menjalankan program kerja dengan baik.⁵⁷

Informasi anggaran tidak hanya pada informasi perencanaan dan pengembangan saja namun juga terdapat dua laporan yang menjadi tugas penting yakni Laporan Rekapitulasi Anggaran dan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tiap tahunnya.

Capaian kinerja Kementerian PUPR dikelompokkan ke dalam 3 perspektif yang didukung oleh 15 (lima belas) sasaran strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Menteri di dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Kementerian PUPR Tahun 2016 adalah sangat memuaskan dengan nilai 102,57%. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Kementerian PUPR di pusat dan di daerah pada 11 (sebelas) unit organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sesuai dengan rencana strategis dan direktif Presiden.⁵⁸

Sebagai gambaran Dari laporannya ada pada 8 (delapan) capaian sasaran strategis dapat memenuhi target 2016, dengan rincian sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019. Diakses dari alamat <http://pu.go.id/uploads/info-anggaran/renstra/Renstra-2015-2019.pdf> pada tanggal 20 Juni 2017

⁵⁸ Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Diakses dari alamat <http://pu.go.id/images/uploads/banner/announce20170614104316.pdf> pada tanggal 20 juni 2017

⁵⁹ ibid

- Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi, dengan realisasi 53,14% dan kinerja 105,58%;
- Tingkat konektivitas jalan nasional, dengan realisasi 75,35% dan kinerja 101,82%;
- Tingkat dukungan ketahanan air nasional, dengan realisasi 42,90% dan kinerja 122,57%;
- Tingkat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR, dengan realisasi 75,36% dan kinerja 139,56%;
- Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional, dengan realisasi 90,44% dan kinerja 115,94%;
- Prosentase sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, dengan realisasi 30,04% dan kinerja 120,16%;
- Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR, dengan realisasi 100% dan kinerja 144,92%;
- Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana, dengan realisasi 87,19% dan kinerja 102,58%;

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja lainnya yang capaian kerjanya kurang dari 100%, indikator tersebut adalah: ⁶⁰

⁶⁰ ibid

- Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan, dengan realisasi 76,59% dan kinerja 90,10%;
- Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, dengan realisasi 79,95% dan kinerja 95,17%;
- Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR, dengan realisasi 77,04% dan kinerja 90,63%;
- Tingkat kemantapan jalan nasional, dengan realisasi 89,38% dan kinerja 98,21%;
- Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman, dengan realisasi 75,73% dan kinerja 91,24%;
- Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan realisasi 84,17% dan kinerja 99,02%;
- Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan realisasi 76,51% dan kinerja 98,72%.

4.2 PROGRAM USRI IPAL ⁶¹

Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM-Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara

⁶¹ Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tentang Program Sanitasi Perkotaan berbasis masyarakat, diakses dari alamat <http://ciptakarya.pu.go.id/spbm-usri/index.php?page=sanitasi/tentang> pada tanggal 20 juni 2017

individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara utuh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan sarana untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat disekitarnya.

Mekanisme penyelenggaraan Program Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung upaya pencapaian target MDG pada 2015, yaitu menurunkan sebesar separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.

Program SPBM ini dilaksanakan secara bertahap di 1350 kelurahan yang berada di 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM sebanyak 3 kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat

(BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Program SPBM ini masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.⁶²

Sasaran Program SPBM adalah:

- Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat melalui kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal) yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan;
- Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana/sarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal) secara partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan;
- Tersusunnya Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP) yang responsif kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
- Meningkatnya kemampuan perangkat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan khususnya di sektor penyehatan lingkungan permukiman.

⁶² Cipta Karya . “Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat BAB II” 2013.

Adapun Ruang Lingkup dari Program SPBM adalah:⁶³

1. Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: (i) fasilitas MCK komunal dan (ii) instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal;
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat.

Kegiatan penyehatan lingkungan permukiman melalui penyediaan sistem sanitasi komunal berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu, mengacu pada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RIPJM), Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), PJM Pronangkis (*Medium Term Poverty Reduction Plan/MTPRP*) dan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (*Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP*) yang telah disusun.

Prinsip dasar Program SPBM adalah

1. Tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti program akan bersaing mendapatkan program dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai dengan pilihannya.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya ditangan masyarakat, peran pemerintah dan konsultan pendamping hanya sebatas sebagai fasilitator.
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh konsultan pendamping

⁶³ ibid

yang mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi pengolahan limbah dan pendampingan sosial.

4. Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat, bukan sebagai pengelola sarana.

Prinsip penyelenggaraan Program SPBM adalah:⁶⁴

1. Dapat diterima; Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah kelurahan sehingga didukung dan diterima oleh masyarakat. Hal ini berlaku mulai dari saat pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis (jenis prasarana/sarana dan pilihan teknologi yang digunakan), penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, serta penetapan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat.
2. Transparan; Penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat dan perangkat pemerintah daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan dan evaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan; Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
4. Berkelanjutan; Penyelenggaraan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

⁶⁴ Ibid

5. Kerangka Jangka Menengah; Penyelenggaraan dilaksanakan pada kerangka jangka menengah sebagai dasar upaya peningkatan akses terhadap pelayanan prasarana dan sarana sanitasi bagi penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/ marjinal.
6. Sederhana, Tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bersifat sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder.

Program SPBM merupakan program pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, dengan pendekatan: ⁶⁵

1. Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
2. Keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan ditujukan kepada kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab penuh pada penyelenggaraan program dan keberlanjutan prasarana/sarana terbangun;

⁶⁵ Ibid

4. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin;
5. Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemeliharaan hasil kegiatan;
6. Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain.
7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman.
8. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya terdapat kesetaraan antara kaum pria dan perempuan dalam setiap tahap pembangunan dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan secara adil

BAB V

**IMPLEMENTASI DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MALANG
PADA PROGRAM SANITASI BERBASIS USRI IPAL KOMUNAL**

5.1 Komunikasi Dinas PU dalam Konteks Internal dan Eksternal

Seperti yang dijelaskan pada pemahaman konsep oleh Edward III dimana Komunikasi berperan pada pengelolaan kebijakan yang berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.⁶⁶

Jika pada komunikasi mampu menghasilkan bentuk transmisi, kejelasan dan konsistensi maka ketiganya merupakan hal hal yang menjadi indikator penting dalam menyampaikan bentuk komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

5.1.1 Transmisi Dinas PU Pada Program USRI IPAL

Transmisi, bentuk komunikasi ini lebih kepada menjalankan program USRI IPAL oleh dinas Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan pihak

⁶⁶Riant Nugroho, 2012, Public Policy. Jakarta: Gramedia, hal. 191

donor dan organisasi structural. Dalam model ini maka PU telah menjalankan proses koordinasi pihak donor dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pihak ADB (*Asia Development Bank*).

Pada program yang dilaksanakan di tahun 2013 dan 2014 menghasilkan laporan keikutsertaan komunikasi dalam poin transmisi ini memunculkan adanya beberapa pihak yang berkoordinasi menjadi satu kesatuan yakni BKM/LKM (Badan Keswadayaan Masyarakat / Lembaga Keswadayaan Masyarakat, KSM (kelompok Swadaya Masyarakat), dan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara) . tiga komponen *stakeholder* tersebut yang menjadi aktor dalam pelaksana program USRI IPAL di Kota Malang. Sebagai rangkumannya bahwa BKM/LKM tersebar di berbagai wilayah kecamatan seperti Blimbing, Kedugkandang, Klojen dan Sukun.

BKM/LKM sendiri telah banyak didominasi oleh jumlah pengurus pria dibanding dengan perempuan di kesemua wilayah lokasi sasaran. Namun ada yang berbeda di Kecamatan Sukun dengan Lokasi Kebonsari dengan nama BKMnya Kebonsari Makmur memiliki kuantitas yang sama antara perempuan dan pria itu sendiri. pengurus dalam BKM ini memiliki tujuan sebagai lembaga tertinggi yang mewadahi konsep dan jalannya program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat ini di tingkat kelurahan.

Berbeda dengan aktor komponen program yang lebih rendah lagi setelah BKM adalah KSM sanitasi dimana hal ini bersama dengan kader masyarakat untuk menyusun rencana kerja masyarakat dalam proses

pembangunan sarana prasarana sanitasi, DED, RAB dengan difasilitasi langsung oleh fasilitator yang telah dipilih dari dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota Malang. KSM ini juga menjadi pelaksana langsung dalam program USRI IPAL di Kota Malang. Jumlah pengurus masih sama didominasi oleh kaum pria. Dan terdapat dua lokasi yang memiliki jumlah pengurus pria dan wanita hampir seimbang yaitu nama KSM Kla Project yang berlokasi di bandungrejosari kecamatan Sukun yaitu terdapat pada prosentase 54% dan 46%, sedangkan untuk KSM dengan nama Sanitasi 5 yang terletak di Mulyorejo mendapatkan kuantitas persentase yang seimbang yaitu 50% dan 50%.

KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan) sendiri juga menjadi bagian penting dalam menjalankan tujuan dan fungsi program yang memberikan penanganan pada permasalahan sanitasi perkotaan yang berbasis masyarakat. Kelompok ini berkoordinasi langsung dengan masyarakat sasaran, KSM, BKM dan Dinas PU Kota. Dalam data yang di langsir dari laporan tahunan 2013 dan 2014. Untuk tahun 2013 sendiri tidak ada gap yang mencolok antara jumlah pengurus pria dan perempuan. Kecuali terletak pada KPP Bersinar yang berlokasi di Kedungkandang ini memiliki kuantitas jumlah pengurus perempuan hingga mencapai 100%. Kondisinya tidak bergitu berbeda dengan yang terjadi di tahun 2014, dimana pada tahun tersebut masih tidak terdapat gap besar antara pria dan wanita. Kondisi kesamaan jumlah pria dan wanita yang tidak terlalu jauh akan semakin

memudahkan fungsi dan tujuan program agar terlaksana dengan baik karena tidak ada faktor mendominasi dan menguasai program.

Pengelolaan program USRI IPAL di Kota Malang telah mampu mencapai bentuk komunikasi yang bagus dalam indikator transmisi. Dimana transmisi sendiri berperan pada beberapa *stakeholder* yang berperan aktif dalam mewujudkan program yang terjun langsung kepada pelaksanaan program di lokasi yang menjadi sasaran dari dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Komunikasi transmisi ini mengaitkan seluruh elemen baik dari tingkat masyarakat, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi , dan pusat. Koordinasi ini juga tergantung fungsi dan tugas kerja masing – masing yang bisa dikaitkan dengan pihak donor atau bantuan luar negeri. Baik itu berupa bantuan, pinjaman atau hutang.

Tabel 5.1. Kelembagaan Tingkat Masyarakat Pada Program USRI IPAL di Kota Malang Pada Tahun 2013

KECAMATAN	LOKASI	BKM / LKM						KSM					
		Nama BKM/LKM	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P	Nama KSM	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P
Blimbing	Balearjosari	BINA SEJAHTERA	9	8	89%	1	11%	SETIA BERSIH	18	12	67%	6	33%
Blimbing	Polehan	POLEHAN	9	7	78%	2	22%	KRESNO	21	13	62%	8	38%
Blimbing	Purwodadi	PURWODADI	13	9	69%	4	31%	ANGGREK	17	12	71%	5	29%
Kedungkandang	Arjowinangun	ARJUNA	9	8	89%	1	11%	ARJOWINANGUN SEHAT	14	11	79%	3	21%
Kedungkandang	Kedungkandang	BUDI ARTHA JAYA	9	7	78%	2	22%	KEDUNGKANDANG BERSINAR	17	13	76%	4	24%
Kedungkandang	Kotalama	SEJAHTERA	6	6	100%	0	0%	SADAR LINGKUNGAN 2	13	7	54%	6	46%
Kedungkandang	Tlogowaru	TLOGO MAKMUR	9	7	78%	2	22%	TLOGOWARU SEHAT	17	13	76%	4	24%
Klojen	Gadingkasri	MANDIRI	8	7	88%	1	13%	KAMPUNG DULUR	15	13	87%	2	13%
Klojen	Samaan	MANDIRI	8	7	88%	1	13%	TAPAK SIRING	8	5	63%	3	38%
Sukun	Bandungrejosari	GUYUB RUKUN	11	10	91%	1	9%	KLA PROJECT	13	7	54%	6	46%
Sukun	Karang Besuki	KARANGBESUKI	11	9	82%	2	18%	MANUGGAL	15	9	60%	6	40%
Sukun	Kebonsari	KEBONSARI MAKMUR	8	4	50%	4	50%	SENTOSA	18	12	67%	6	33%
Sukun	Mulyorejo	BINA MARGA MANDIRI	9	8	89%	1	11%	SANITSI 5	8	4	50%	4	50%
Sukun	Sukun	SUKUN JAYA	11	8	73%	3	27%	IPAL ANUGRAH	16	10	63%	6	38%
Sukun	Tanjungrejo	TANJUNGREJO	15	12	80%	3	20%	BAROKAH	8	8	100%	0	0%

KPP					
Nama KPP	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P
KPP BALEARJOSARI	8	4	50%	4	50%
KPP KRESNO	8	4	50%	4	50%
KPP ANGREK	8	4	50%	4	50%
KPP ARJOWINANGUN	3	1	33%	2	67%
KPP BERSINANR	3	0	0%	3	100%
KPP SANITASI RW 10	12	7	58%	5	42%
KPP TLOGOWARU	5	2	40%	3	60%
KPP KAMPUNG DULUR	9	4	44%	5	56%
KPP TAPAK SIRING	5	2	40%	3	60%
KPP SANITASI RW 12	10	6	60%	4	40%
KPP MANUNGGAL	7	4	57%	3	43%
KPP IPAL SENTOSA	15	9	60%	6	40%
KPP SANITASI 5	8	4	50%	4	50%
KPP IPAL ANUGRAH	7	4	57%	3	43%
KPP BAROKAH	10	5	50%	5	50%

Sumber : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2013

Tabel 5.2. Kelembagaan Tingkat Masyarakat Pada Program USRI IPAL di Kota Malang Pada Tahun 2014

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LOKASI	BKM / LKM					
				Nama BKM/LKM	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P
Jawa Timur	Kota Malang	Blimbing	Balearjosari	BINA SEJAHTERA	14	11	79%	3	21%
Jawa Timur	Kota Malang	Blimbing	Jodipan	JODIPAN	8	8	100%	0	0%
Jawa Timur	Kota Malang	Blimbing	Polehan	POLEHAN	16	12	75%	4	25%
Jawa Timur	Kota Malang	Blimbing	Purwantoro	PURWANTORO	21	16	76%	5	24%
Jawa Timur	Kota Malang	Blimbing	Purwodadi	PURWODADI	20	12	60%	8	40%
Jawa Timur	Kota Malang	Kedungkandang	Kedungkandang	BUDI ARTHA JAYA	14	10	71%	4	29%
Jawa Timur	Kota Malang	Kedungkandang	Kotalama	SEJAHTERA	11	8	73%	3	27%
Jawa Timur	Kota Malang	Klojen	Gadingkasri	BINA WARGA MANDIRI	11	8	73%	3	27%
Jawa Timur	Kota Malang	Klojen	Oro Oro Dowo	CITRA MANDIRI	12	10	83%	2	17%
Jawa Timur	Kota Malang	Klojen	Samaan	MANDIRI	8	7	88%	1	13%
Jawa Timur	Kota Malang	Sukun	Bandungrejosari	GUYUB RUKUN	15	14	93%	1	7%
Jawa Timur	Kota Malang	Sukun	Ciptomulyo	WARGO MULYO	8	6	75%	2	25%
Jawa Timur	Kota Malang	Sukun	Karang Besuki	KARANGBESUKI	15	12	80%	3	20%
Jawa Timur	Kota Malang	Sukun	Kebonsari	KEBONSARI MAKMUR	14	9	64%	5	36%
Jawa Timur	Kota Malang	Sukun	Sukun	SUKUN JAYA	16	13	81%	3	19%

KSM						KPP					
Nama KSM	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P	Nama KPP	Jumlah Pengurus	Σ Laki	% L	Σ P	% P
ASAM MANIS 2	15	9	60%	6	40%	SETIA BERSIH	6	3	50%	3	50%
HAYAMURUK	10	6	60%	4	40%	KPP HAYAMURUK	10	5	50%	5	50%
ABIMANYU	8	4	50%	4	50%	ABIMANYU	10	6	60%	4	40%
SANAN ASRI	11	6	55%	5	45%	SANAN ASRI	12	4	33%	8	67%
SANITASI MANUNGGALING	15	9	60%	6	40%	MANUGGALING WARGA	9	3	33%	6	67%
SANITASI	12	7	58%	5	42%	KEDUNGKANDANG BERIMAN 2	10	5	50%	5	50%
SADAR LINGKUNGAN 3	12	10	83%	2	17%	DARLING 3	5	2	40%	3	60%
KSM SANITASI RW VI	12	6	50%	6	50%	KAMPUNG JANNAH	3	1	33%	2	67%
KSM CITRA MANDIRI	13	8	62%	5	38%	KPP CITRA MANDIRI SANITASI	9	4	44%	5	56%
KSM SANITASI RW 05	17	10	59%	7	41%	MANU SATIR	6	3	50%	3	50%
SIMPATIK 10	13	7	54%	6	46%	KPP SEJAHTERA	8	4	50%	4	50%
KAMPUNG BARU	12	6	50%	6	50%	HARAPAN BARU	8	2	25%	6	75%
KSM BERSERI	15	8	53%	7	47%	KPP BERSERI	12	7	58%	5	42%
SALAK	12	7	58%	5	42%	KPP SALAK	7	4	57%	3	43%
IPAL ANUGERAH 2	17	10	59%	7	41%	KPP IPAL ANUGRAH II	10	6	60%	4	40%

Sumber : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2013

5.1.2. Kejelasan Pada Program USRI IPAL Kota Malang

Poin indikator ini merupakan yang dilakukan secara awal dalam bentuk sosialisasi dimana PU (Pekerjaan Umum) menggambarkan permasalahan yang ada di Kota Malang dan mencanangkan strategi pelaksanaan secara bersamaan. Kondisi dan permasalahan dalam program adalah dengan adanya air limbah masyarakat yang menyebabkan keadaan sanitasi yang tidak bagus. Kondisi sanitasi di Indonesia sendiri bermunculan karena adanya sampah yang berserakan di saluran drainase, air buangan industri yang tidak memiliki bentuk pengolahan yang memadai, kondisi dimana masih banyak masyarakat yang membuang air besar sembarangan atau biasa disebut dengan (*open defecation*), jamban yang asal asalan, pembuangan lumpur tinja secara liar, dan aktivitas membersihkan baik pakaian maupun tubuh di kondisi sungai yang sudah tercemar.

Komponen kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi komunal dilaksanakan melalui penyediaan dana *block grant* dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi setiap kelurahan sasaran dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Besaran alokasi dana BLM yang disediakan untuk pembangunan prasarana-sarana sanitasi bagi setiap lokasi sasaran sebesar Rp. 350 juta (tiga ratus lima puluh juta rupiah).⁶⁷

⁶⁷Cipta Karya ,2013 “Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat BAB III” halaman 3-7

Setiap kelurahan sasaran dimungkinkan untuk mengajukan usulan lebih dari 1 (satu) sistem sanitasi komunal yang akan dibiayai melalui BLM dengan ketentuan:

- setiap lokasi minimal terlayani 200 jiwa setara 50 KK dengan kapasitas IPAL untuk 300 jiwa setara dengan 75 KK;
- lokasi sasaran berada didaerah perkotaan;
- diutamakan kelurahan yang berada di zona merah sesuai dengan SSK
- telah menerima bantuan PNPM Mandiri Perkotaan.
- Jika kelurahan tersebut menerima lebih dari satu BLM maka KSM dibentuk sesuai dengan dana BLM yang di terima.

Prasarana dan sarana sanitasi komunal yang dibangun melalui Program SPBM USRI adalah sistem sanitasi komunal yang meliputi :⁶⁸

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dengan sistem perpipaan
- b. Kombinasi IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan MCK.

Program USRI IPAL diadakan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 di kota Malang, berikut adalah perincian lokasi yang dilakukan oleh program USRI IPAL di Kota Malang. Total lokasi penerima program sanimas USRI di Kota Malang ada 54 lokasi, dengan perincian sebagai berikut: ⁶⁹

- Kecamatan Klojen ada 8 lokasi (Kelurahan Bareng, Kasin, Oro-oro Dowo, Gadingkasri dan Samaan)

⁶⁸ ibid

⁶⁹ Cipta Karya, "Pedoman Umum Pelaksanaan Program USRI IPAL BAB III" halaman 8-9

- Kecamatan Blimbing ada 13 lokasi (Kelurahan Bunulrejo, Blimbing, Jodipan, Pandanwangi, Purwantoro, Balarjosari, Polehan, Purwodadi)
- Kecamatan Lowokwaru ada 5 lokasi (Kelurahan Tlogomas, Dinoyo, Merjosari, Sumpersari dan Tunggulwulung)
- Kecamatan Sukun ada 16 lokasi (Kelurahan Ciptomulyo, Tanjungrejo, Bandungrejosari, Gadang, Mulyorejo, Karangbesuki, Kebonsari, Sukun,)
- Kecamatan Kedungkandang ada 12 lokasi (Kelurahan Buring, Lesanpuro, Mergosono, Wonokoyo, Kotalama, Madyopuro, Arjowinangun, Kedungkandang)

Prasarana dan sarana sanitasi komunal tersebut didesain dengan mempertimbangan kemudahan bagi perempuan, orang cacat, anak-anak dan warga usia lanjut. Untuk mengetahui sasaran dalam lahan dan lokasi, maka para aktor dalam pelaksanaan program ini harus mengetahui dengan jelas akan ketersediaan lahan sebelum melakukan program. Sasaran lokasi pada program usri IPAL baik tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perbedaan yaitu pada kecamatan blimbing, kedungkandang, Klojen dan Sukun. Kejelasan lahan juga meliputi komponen opsi sarana infrastruktur, Lingkungan sasaran, luas lahan, status lahan, kontur lahan, akses menuju lahan dan tekstur lahan.

Dalam tabel tahun 2013 dijelaskan bahwa luas lahan yang menjadi program ini berkisar rata rata pada angka 50 M², namun berbeda dengan dua lokasi yang berada di kecamatan sukun dimana lokasi Kebonsari di Jl. Satsuitubun RT.05 RW.03 Kelurahan Kebonsari memiliki luas lahan hingga 200 M² dan di lokasi

sukun yang berkawasan di jalan RT 16 / RW VI mencapai hingga 75 M2. Status lahan pada tahun 2013 ini mendominasi status hibah, kecuali untuk status aset terletak di beberapa titik sebagai berikut: Kecamatan Kedungkandang dengan lokasi Kotalama dan Tlogowaru, Wilayah Kecamatan Klojen berada di titik Samaan dan Gadingkasri, dan Kecamatan Sukun untuk lokasi Mulyorejo dan Tanjungrejo. Kejelasan luas lahan dengan status lahan menjadi sangat penting dalam membentuk koordinasi program untuk masyarakat jika posisinya keberadaan bantuan luar negeri atau lembaga asing yang membantu pergerakan program tersebut memahami alokasi tersebut. alokasi lahan berfungsi untuk mengatur sasaran masyarakat, pendanaan, proposal, pencapaian atau target dan juga menjadi bentuk rencana anggaran yang perlu diprospekkan ke depannya.

Berikut merupakan tabel mengenai kejelasan lahan pembangunan dalam pelaksanaan program USRI IPAL tahun 2013 – 2014:

Tabel 5.3. Data Lahan Program USRI IPAL Komunal Kota Malang Tahun 2013

KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	DATA LAHAN					
			RT/RW/Dusun/Lingkungan	Luas Lahan(M2)	Status Lahan	Kontur Lahan	Akses Menuju Lahan	Tekstur Lahan
Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal	Lingkungan Karang Asem RT 03 / RW II	50	Hibah	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Blimbing	Polehan	IPAL Komunal	Kresna RT 01 / RW I	52	Hibah	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Blimbing	Purwodadi	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	RT 01 / RW VII	39	Hibah	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Kedungkandang	Arjowinangun	IPAL Komunal	Arjowinangun / Arjowinangun / 05 / 03	47.85	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Kedungkandang	Kedungkandang	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	kedungkandang / 03 / IV	52.5	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Basah
Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	Muharto VII / RT 07,08 / RW X	49	Aset	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras
Kedungkandang	Tlogowaru	IPAL Komunal	RT 02, 03 / RW III	52.5	Aset	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal	RW. III. Kel Gading Kasri.	56	Aset	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Klojen	Samaan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	RT 05 / RW VIII	70	Aset	Datar	Jln Setapak	Tanah Basah
Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal	Klyatan GG1 / RT 06 / RW XII	49	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal	RT 06 / RW V	52	Hibah	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal	Jl. Satsuitubun RT.05 RW.03 Kelurahan Kebonsari	200	Hibah	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Sukun	Mulyorejo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	04 / V	52.5	Aset	Datar	Jln Setapak	Tanah Basah
Sukun	Sukun	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	RT 16 / RW VI	75	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Tanjungrejo	IPAL Komunal	sukun gempol / RT 17 / RW IX	49	Aset	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras

Sumber: Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunanal di Kota Malang tahun 2013

Tabel 5.4. Data Lahan Program USRI IPAL Komunal Kota Malang Tahun 2014

KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	DATA LAHAN					
			RT/RW/Dusun/Lingkungan	Luas Lahan (M ²)	Status Lahan	Kontur Lahan	Akses Menuju Lahan	Tekstur Lahan
Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal	Balearjosari, RT 08/RW 02	56	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Blimbing	Jodipan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	Jodipan RT 03/ RW 01	60	Aset	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Blimbing	Polehan	IPAL Komunal	Polehan, RT 14/ RW 03	60	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Blimbing	Purwantoro	IPAL Komunal	Purwantoro, RT 05/ RW 14	35	Aset	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Blimbing	Purwodadi	IPAL Komunal	Purwodadi, RT 07 / RW 12	45	Aset	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Kedungkandang	Kedungkandang	IPAL Komunal	Kedungkandang, RT 05 /RW 06	60	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	Kotalama, RT 08/RW 09	50	Aset	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal	Gadingkasri, RT 04/ RW 03	70	Aset	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Klojen	Oro Oro Dowo	IPAL Komunal	Oro-oro Dowo, RT 03 / RW 06	59.9	Hibah	Miring	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Klojen	Samaan	IPAL Komunal	Sama'an , RT 05 / RW 02	70	Hibah	Miring	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal	Bandungrejosari, RT 03/ RW 10	47.25	Hibah	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Ciptomulyo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	Ciptomulyo, RT 14/ RW 03	38.5	Aset	Datar	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal	Karangbesuki, RT 12/ RW 03	67.5	Aset	Miring	Jln Lingkungan	Tanah Keras
Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal	Kebonsari, RT 4 & 5 / RW 05	67.5	Hibah	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras
Sukun	Sukun	IPAL Komunal	Sukun, RT 05/ RW 02	49	Aset	Datar	Jln Setapak	Tanah Keras

Sumber : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2014

5.1.3 Konsistensi Program USRI IPAL Kota Malang

Dalam konsistensi program sendiri *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) diciptakan untuk mendukung dan menjalankan program PNPM Mandiri yang merupakan kegiatan dari kelanjutan RIS PNPM 2 dan kegiatan *Urban Sanitation*. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 4 (empat) tahun (2011-2014), namun mengingat proses efektifnya pinjaman ini paling cepat Bulan Desember 2011, maka untuk kegiatan Urban Sanitation diusulkan pelaksanaan secara menyeluruh pada tahun 2012.

Urban Sanitation merupakan bagian dari USRI, yaitu kegiatan peningkatan dan perbaikan sanitasi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Komponen pada *Urban Sanitation* adalah pembangunan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat, dengan jumlah alokasi dana (BLM) sebesar Rp 350 juta per lokasi.

Rural Infrastructure sendiri merupakan bagian dari USRI, yaitu kegiatan peningkatan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Komponen pada *Rural Infrastructure* adalah pembangunan sarana infrastruktur perdesaan, dengan jumlah alokasi dana (BLM) sebesar Rp 250 juta per desa.

70

⁷⁰Cipta Karya . “Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat BAB II tentang pelaksanaan” halaman 10-11. 2013

Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan pelaksanaan kegiatan seperti berikut:

1. Gender minimal 40% adalah perempuan
2. Tidak ada pembebasan lahan
3. Keterlibatan masyarakat mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengoperasian
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesehatan keluarga serta perbaikan kualitas lingkungan

Program ini tak lain juga memiliki visi dan misi sebelum mengarah pada bentuk pencapaian akhir atau hasil dari pemenuhan suatu pelaksanaan. Adapun Visi Misi dari program USRI IPAL sendiri adalah: ⁷¹

VISI dan Misi

“Berkurangnya angka kemiskinan melalui peningkatan akses sarana sanitasi di lokasi sasaran.”

1. Mewujudkan masyarakat yang sadar sanitasi untuk hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak dan berkualitas.

Dalam mewujudkan konsistensi maka terdapat komponen program sanitasi berbasis masyarakat (SPBM) yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat,

⁷¹Cipta Karya . “Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat BAB II” 2013.

pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal, dan peningkatan kapasitas pemerintah kota/ kabupaten. Namun yang menjadi fokus dari penulis dalam penelitian ini hanyalah pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal di daerah kota Malang.

Dari visi misi di atas mampu memberikan gambaran bagi penulis untuk mendapatkan keadaan yang sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian hasil akhir. Kondisi tersebut memungkinkan bagi penulis untuk memahami bahwa konsistensi dalam variabel komunikasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan sebuah program yang menghadirkan banyak *stakeholder* untuk merealisasikannya.

Pencapaian atas apa yang direncanakan dalam program itu memunculkan data yang menjelaskan sesuai dan tidak sesuai. Pada tahun realisasi 2013, dimana dari jumlah lokasi sasaran sebanyak 15 titik. Terdapat 6 lokasi yang tidak sesuai antara rencana penerima manfaat dan realisasi penerima manfaat, lokasi tersebut antara lain: seluruh lokasi yang berada di kecamatan Blimbing yakni Balarjosari, Polehan, dan Purwodadi, Dua kawasan yang terletak di Kecamatan Klojen yaitu Gadingkasri dan Samaan, serta yang terakhir ada paa kawasan Kedungkandang yang berlokasi di Tlogowaru. Hasil ketidaksesuaian tersebut berdampak pada program yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga kondisi konsistensi inilah yang sangat penting untuk proses komunikasi pada pemenuhan program, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5. Pemanfaat Sarana Infrastruktur Program Sanimas USRI IPAL 2013

KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	RENCANA PENERIMA MANFAAT						REALISASI PENERIMA MANFAAT						Analisa Jiwa < 200 (Pedoman)
			Σ SR	Σ KK	Σ KK Miskin	Σ Pema nfaat (jiwa)	Σ P	Σ Warga Miskin	Σ SR	Σ KK	Σ KK Miskin	Σ Peman faat (jiwa)	Σ P	Σ Warga Miskin	
Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	60	18	240	105	72	42	42	18	161	84	72	Tidak Sesuai
Blimbing	Polehan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	60	25	230	131	96	38	38	20	145	83	62	Tidak Sesuai
Blimbing	Purwodadi	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	30	60	42	216	104	168	21	21	12	91	44	38	Tidak Sesuai
Kedungkandang	Arjowinangun	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	60	22	240	125	89	60	60	22	240	125	89	Sesuai
Kedungkandang	Kedungkandang	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	50	60	25	280	110	100	40	50	25	204	102	100	Sesuai
Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	35	68	58	238	119	220	35	56	38	227	109	156	Sesuai
Kedungkandang	Tlogowaru	IPAL Komunal dgn Perpipaan	70	70	30	280	177	120	34	34	30	134	68	120	Tidak Sesuai
Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal dgn Perpipaan	52	136	81	399	214	187	37	37	13	131	84	34	Tidak Sesuai
Klojen	Samaan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	60	60	20	240	132	80	15	15	10	60	33	42	Tidak Sesuai
Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	72	72	48	292	140	216	71	71	48	286	137	216	Sesuai
Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal dgn Perpipaan	55	68	33	272	133	142	55	68	33	282	154	142	Sesuai
Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	67	67	27	814	483	108	25	28	13	739	379	58	Sesuai
Sukun	Mulyorejo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	72	79	22	439	211	87	45	52	22	228	116	87	Sesuai
Sukun	Sukun	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	47	59	34	245	125	128	47	56	34	231	117	128	Sesuai
Sukun	Tanjungrejo	IPAL Komunal dgn Perpipaan	56	68	60	251	128	228	56	68	60	251	128	228	Sesuai

Sumber. : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2013

Tabel di atas menjelaskan mengenai kondisi perencanaan dan realisasi yang ada dalam tahap pemanfaatan sarana infrastruktur program sanitasi program USRI IPAL. Maka bisa dirangkum seperti tabel di bawah ini pada tahun 2013 dan 2014:

Tabel 5.6. Pemanfaatan Realiasi Program USRI IPAL 2013

No	KELURAHAN	RENCANA PENERIMA MANFAAT		REALISASI PENERIMA MANFAAT	
		Σ SR	Σ KK	Σ SR	Σ KK
1	Balearjosari	60	60	42	42
2	Polehan	60	60	38	38
3	Purwodadi	30	60	21	21
4	Arjowinangun	60	60	60	60
5	Kedungkandang	50	60	40	50
6	Kotalama	35	68	35	38
7	Tlogowaru	70	70	34	34
8	Gadingkasri	52	136	37	37
9	Samaan	60	60	15	15
10	Bandungrejosari	72	72	71	71
11	Karang Besuki	55	68	55	68
12	Kebonsari	67	67	25	28
13	Mulyorejo	72	79	45	52
14	Sukun	47	59	47	56
15	Tanjungrejo	56	68	56	68

Sumber. : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2013

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa ada beberapa kelurahan yang mengalami ketidaksesuaian dalam skala yang besar atas pemanfaatan dari tahap rencana hingga realisasi. Kelurahan tersebut meliputi Balearjosari, Polehan, Purwodadi Tlogowaru, Gadingkasri, dan Samaan. Penjelasan tahun 2013 tersebut juga mengalami perubahan yang berbeda dengan tahap realisasi pada tahun 2014, seperti berikut:

Tabel 5.7. Pemanfaatan Realiasi Program USRI IPAL 2014

No	KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	RENCANA	REALISASI
				Σ SR	Σ SR
1	Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	53	28
2	Blimbing	Jodipan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	40	40
3	Blimbing	Polehan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	45
4	Blimbing	Purwantoro	IPAL Komunal dgn Perpipaan	62	40
5	Blimbing	Purwodadi	IPAL Komunal dgn Perpipaan	65	25
6	Kedungkandang	Kedungkandang	IPAL Komunal dgn Perpipaan	64	43
7	Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	45	30
8	Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal dgn Perpipaan	62	33
9	Klojen	Oro Oro Dowo	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	30
10	Klojen	Samaan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	60	40
11	Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	63	50
12	Sukun	Ciptomulyo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	54	47
13	Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal dgn Perpipaan	50	25
14	Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	50	20
15	Sukun	Sukun	IPAL Komunal dgn Perpipaan	55	27

Sumber. : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2014

Tabel pada laporan USRI IPAL pada tahun 2014 di atas tidak mencantumkan Jumlah KK seperti pada tahun sebelumnya. Dimana realisasi ditujukan pada bantu perencanaan sasaran dan realisasinya. Adapun lokasi yang tidak sesuai dengan rencana yaitu Balearjosari, Polehan, Purwodadi, Gadingkasri, Oro Oro Dowo, Samaan, Karang Basuki, Kebonsari dan Sukun. Penelitian kondisi tahun 2014 ini bisa dikatakan bahwa hampir seluruh perencanaan tidak sesuai pada capaian.

5.2 Sumber Daya Dinas PU dalam Program USRI IPAL

5.2.1 Staf Pada Program USRI IPAL Kota Malang

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan program secara langsung di tingkat masyarakat kelurahan. Jumlah Fasilitator disesuaikan dengan jumlah kelurahan sasaran

dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan, dengan jumlah 30% dari total fasilitator adalah perempuan. Setiap tim Fasilitator terdiri dari 5 (lima) orang untuk menangani kurang lebih 3 (tiga) kelurahan. Terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator pemberdayaan sanitasi, 2 (dua) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator manajemen.

Untuk keterangan kota Malang sendiri, staf ini langsung ke lembaga masyarakat yang ikut berkontribusi pada pemenuhan program dimana baik pada tahun 2013 maupun 2014, Jumlah tenaga kerja yang diperuntukkan untuk menjalankan program USRI IPAL Komunal di Kota Malang yang tersebar di 15 lokasi dengan Keterangan Kecamatan yang meliputi Blimbing, Kedungkandang, Klojen dan Sukun ini mencapai pada kisaran 10 hingga ke 30 orang tenaga kerja yang mengoperasionalkan program langsung pada masyarakat setempat. Keterangan yang jelas terhadap pembagian jumlah tenaga kerja berdasarkan gender Pria dan Perempuan menjadi komponen untuk menjalankan proses program dengan baik.

Keterangan berbeda terjelaskan pada tahun 2014. Terdapat penurunan efektifitas staf beserta jumlahnya karena program sudah tercukupkan pada tahun sebelumnya. Pemasukan staf hanya ada di empat lokasi dari 15 lokasi sasaran. Ke-empat lokasi tersebut meliputi : Balarjosari, Jodipan, Purwantoro, dan Purwodadi. Data tersebut tertera jelas seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.8. Tenaga Kerja pada Program USRI IPAL 2013

KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	TENAGA KERJA			HARI ORANG KERJA (HOK)				
			L	P	Jumlah	Pekerja	Tukang	Jala Tuka	Mandor	Jumlah
Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	22	6	28	18	8	1	1	28
Blimbing	Polehan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	17	2	19	14	4	1	1	20
Blimbing	Purwodadi	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	21	3	24	18	4	1	1	24
Kedungkandang	Arjowinangun	IPAL Komunal dgn Perpipaan	17	2	19	6	7	3	1	17
Kedungkandang	Kedungkandang	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	18	0	18	11	5	1	1	18
Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	23	3	26	16	7	2	1	26
Kedungkandang	Tlogowaru	IPAL Komunal dgn Perpipaan	17	0	17	10	5	1	1	17
Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal dgn Perpipaan	10	2	12	8	2	1	1	12
Klojen	Samaan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	10	4	14	9	3	1	1	14
Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	21	2	23	13	7	2	1	23
Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal dgn Perpipaan	24	3	27	20	6	1	1	28
Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	24	4	28	20	5	1	1	27
Sukun	Mulyorejo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	8	2	10	4	2	1	1	8
Sukun	Sukun	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	18	2	20	15	3	1	1	20
Sukun	Tanjungrejo	IPAL Komunal dgn Perpipaan	17	4	21	13	6	2	1	22

Sumber. : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2013

Tabel 5.9. Tenaga Kerja pada Program USRI IPAL 2014

KECAMATAN	LOKASI	OPSI SARANA INFRASTRUKTUR	TENAGA KERJA			HARI ORANG KERJA (HOK)
			L	P	Jumlah	
Blimbing	Balearjosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	11	2	13	13
Blimbing	Jodipan	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	60	12	72	72
Blimbing	Polehan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Blimbing	Purwantoro	IPAL Komunal dgn Perpipaan	13	1	14	14
Blimbing	Purwodadi	IPAL Komunal dgn Perpipaan	12	3	15	15
Kedungkandang	Kedungkandang	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Kedungkandang	Kotalama	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	0	0	0	0
Klojen	Gadingkasri	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Klojen	Oro Oro Dowo	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Klojen	Samaan	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Sukun	Bandungrejosari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Sukun	Ciptomulyo	Kombinasi IPAL Komunal dan MCK	0	0	0	0
Sukun	Karang Besuki	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Sukun	Kebonsari	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0
Sukun	Sukun	IPAL Komunal dgn Perpipaan	0	0	0	0

Sumber. : Laporan Capaian Program USRI IPAL Komunal di Kota Malang tahun 2014

5.2.2. Informasi Pada Program USRI IPAL Kota Malang

Dalam informasinya Pemerintah Indonesia dengan dukungan *Asian Development Bank*(ADB) bermaksud mengembangkan skema pelaksanaan PNPM Mandiri melalui; (i) Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan pada desa-desa miskin atau tertinggal di wilayah propinsi yang saat ini telah mendapat dukungan dari ADB, dan (ii) Mempromosikan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target 2015, yakni berkurangnya penduduk yang kurang memiliki akses terhadap sanitasi dasar secara berkelanjutan.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014:

- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%-7% per tahun, dengan pengurangan penduduk miskin menjadi 14.2% pada tahun 2009 menjadi 8-10% pada tahun 2014.
- Target RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.

Pengurangan penduduk miskin tersebut akan dilaksanakan melalui PNPM Mandiri yang sudah berjalan dalam peningkatan pelayanan sosial maupun perbaikan infrastruktur dasar dan perbaikan sanitasi. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SPBM) disusun dengan tujuan untuk menjembatani dan memberikan arah bagi seluruh pelaku mulai dari pemerintah, konsultan, fasilitator dan masyarakat dalam melaksanakan program. Pedoman umum ini

memuat penjelasan ringkas mengenai konsep Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) terkait dengan prinsip dan pendekatan; komponen program, organisasi pelaksana; mekanisme pendanaan; pemantauan dan evaluasi; pengendalian kegiatan; operasional dan pemeliharaan hasil kegiatan dengan harapan mampu memberikan gambaran bagi semua pihak yang terlibat sehingga dapat melaksanakan program ini secara efektif, efisien serta berkelanjutan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan penduduk miskin. Jadi, melalui pelaksanaan Program SPBM ini masyarakat akan merencanakan program mulai dari memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.

Mekanisme penyelenggaraan Program Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) ini menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka mendukung upaya pencapaian target MDG pada 2015, yaitu menurunkan

sebesar separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.

Program SPBM ini dilaksanakan secara bertahap di 1350 kelurahan yang berada di 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM minimal sebanyak 3 kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

5.2.3 Wewenang Dinas PU Pada Program USRI IPAL

Kriteria penentuan kabupaten/kota sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) adalah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota/SSK (City Sanitation Strategy) dan menyampaikan surat jaminan kesiapan keikutsertaan didalam program dan pernyataan dukungan terhadap pembangunan sanitasi masyarakat (*community-lead sanitation development*).⁷²

⁷² Cipta Karya, “ Pedoman Pelaksanaan Program USRI IPAL BAB II” halaman 7-8

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen rencana pembangunan sanitasi jangka menengah tingkat kabupaten/kota yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi. SSK memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, zona dan sistem layanan sanitasi, isu-isu strategis pengelolaan sanitasi, strategi pembangunan sanitasi serta program jangka menengah dan tahunan.

Dokumen SSK digunakan sebagai acuan pembagian peran antar pelaku pembangunan sanitasi, sekaligus sebagai kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah. Penyusunan SSK menggunakan prinsip kerja skala kota dan multisektor; dari, oleh dan untuk Pokja sinkronisasi perencanaan *bottom up* dan *top down*; dan berdasarkan data empiris.

Kriteria kelurahan sasaran adalah :⁷³

1. Kelurahan yang pernah menjadi lokasi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP).
2. Kelurahan yang telah menerima minimal satu kali siklus dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi.
3. Sesuai dengan urutan kemampuan BKM/LKM yaitu menuju berdaya, mandiri dan madani. Penilaian tersebut ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.

⁷³ ibid

Mekanisme pemilihan dan penetapan lokasi sasaran :

1. DPIU melakukan sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka peminatan kelurahan untuk menerima program SPBM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Kelurahan yang berminat menyampaikan Surat Pernyataan Minat yang ditandatangani oleh Lurah dan Koordinator BKM/LKM kepada DPIU.
3. DPIU melakukan verifikasi tentang pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan.
4. DPIU mengajukan usulan lokasi sasaran SPBM kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.

Dalam melakukan tahapan wewenang ini, maka ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan program dari perencanaan hingga tahap realisasi.

- Tahapan Penyiapan Warga

Pada tahapan ini merupakan tahapan bagaimana mengerti kebutuhan masyarakat secara langsung yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program. Dimulai dari pemicuan masyarakat, aktivitas ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman, perubahan sikap dan perilaku masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan dan Pengelolaan sarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.⁷⁴ Dilanjutkan pada tahap sosialisasi awal tingkat kelurahan, dimana Sosialisasi adalah upaya memperkenalkan atau

⁷⁴Cipta Karya, " Pedoman Pelaksanaan Program USRI IPAL BAB III" halaman 35 - 40

menyebarkan informasi mengenai Program SPBM kepada masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan, serta kepada para pelaku dan institusi atau lembaga masyarakat pendukung program di tingkat kelurahan. Tujuan sosialisasi ini agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan program, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan tidak hanya ditetapkan oleh aparat pemerintah kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi masyarakat baik laki laki maupun perempuan.

Tahapan selanjutnya dilakukan dalam bentuk Rembug Khusus Perempuan I dan juga Kelurahan. Rembug Khusus Perempuan I merupakan awal kegiatan kelompok perempuan di tingkat kelurahan. Rembug Khusus Perempuan I dipersiapkan dan dilaksanakan oleh BKM/LKM dengan didampingi oleh Kader Masyarakat, Lurah dan TFL. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Tokoh Perempuan, TFL, pihak Aparat Pemerintahan Kecamatan, Aparat Pemerintahan Kelurahan, Gender Focal Point DPIU dan Sanitarian PUSKESMAS. Sedangkan Rembug Kelurahan I dipersiapkan dan dilaksanakan oleh BKM/LKM/LKM dengan didampingi oleh Kader Masyarakat, Lurah dan TFL. Narasumber dalam kegiatan ini adalah TFL, pihak Kecamatan dan DPIU.⁷⁵

⁷⁵ Ibid

- Tahap Perencanaan ⁷⁶

Tahap perencanaan merupakan lanjutan dari tahapan persiapan. Kegiatan-kegiatan dalam tahapan ini akan dilakukan di seluruh kelurahan dan di RT atau RW setempat. Dimulai dengan Review PJM Pronangkis. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan permasalahan sanitasi telah dicantumkan di dalam PJM Pronangkis. Kemudian Pelaksanaan Pemetaan Sanitasi Kelurahan yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi pelayanan sanitasi kelurahan, kondisi kependudukan, sampai dengan permasalahan sanitasi yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun CSIAP Pronangkis dan Rencana Kerja Masyarakat.

Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan penyusunan dokumen rencana aksi perbaikan sanitasi (*Community Sanitation Improvement Action Plan*) Dari hasil Pemetaan Sanitasi Kelurahan, kemudian Pokja Sanitasi, KM didampingi oleh BKM/LKM dan TFL melakukan identifikasi permasalahan dan pemetaan kondisi sanitasi kelurahan. Hasil identifikasi permasalahan, termasuk hasil Rembug Khusus Perempuan I kemudian dicermati bersama oleh Pokja Sanitasi dan KM yang didampingi TFL untuk merumuskan kondisi sanitasi kelurahan, serta menyusun Dokumen

⁷⁶Cipta Karya, " Pedoman Pelaksanaan Program USRI IPAL BAB IV Tahap Perencanaan" halaman 45 - 66

Rencana Perbaikan Sanitasi di tingkat Kelurahan atau *Community Sanitation Implementation Action Plan (CSIAP)*.

Dalam Tahapan ini juga terdapat aktivitas rembukan seperti pada tahap perencanaan dengan aktor masyarakat perempuan, masyarakat tingkat RT RW, dan kelurahan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pemetaan kebutuhan sanitasi dengan RPA, penyusunan sekaligus pengajuan Rencana kegiatan masyarakat, dan tahapan aktivitas terakhir dalam perencanaan ada pada penyusunan Rencana Anggaran dan Beaya.

- Tahap Pelaksanaan Fisik
- Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik
- Tahap Pengendalian

5.2.4 Fasilitas Pada Program USRI IPAL

SPBM USRI Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat yang mengedepankan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan akhir dari program ini adalah penciptaan masyarakat yang Mandiri dan sejahtera. Penyelenggaraan kegiatan ini telah memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan serta memanfaatkan dan memelihara sendiri.

Fasilitas yang nyata dalam program ini adalah berupa biaya atau sumber dana. Dimana Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan program ini digunakan untuk membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan dalam Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang mana Pengadaan barang/jasa pada SPBM-USRI diselenggarakan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur sanitasi, dimana lokasi kelurahan/desa sasaran SPBM-USRI ditetapkan melalui SK Kepala Daerah penerima program.⁷⁷

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan perincian yang tertera dalam petunjuk ketentuan umum dalam pengadaan barang dan jasa seperti berikut :⁷⁸

1. Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti pengikatnya cukup berupa bukti pembelian/nota pembelian pembayaran dengan materai sesuai ketentuan.
2. Pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan menunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui penawaran

⁷⁷ Clpta Karya, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Baran g dan Jasa" Bab I , halaman 3-5

⁷⁸Clpta Karya, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Baran g dan Jasa" Bab I , halaman 11-12

tertulis dari penyedia barang yang bersangkutan, dan bukti pengikatannya berupa Kuitansi saja dengan materai sesuai ketentuan.

3. Pengadaan barang yang bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dilakukan oleh tim pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang yang berbeda serta memilih penawaran dengan harga terendah, dan bukti pengikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai sesuai ketentuan.
4. Pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dilakukan oleh tim pengadaan yang berjumlah 5 orang dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah, dan bukti pengikatannya berupa Surat Perjanjian dengan sesuai ketentuan.

5.3 Sikap / Disposisi Dinas PU Pada Program USRI IPAL

Untuk kasus penanganan air limbah atau disebut juga penanganan program USRI IPAL itu sendiri sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah PU 16/PRT/M/2008 dimana dalam peraturan tersebut memunculkan 5 kebijakan program air limbah di Indonesia itu sendiri. kebijakan tersebut antara lain : ⁷⁹

⁷⁹Cipta Karya, " Pedoman Pelaksanaan Program USRI IPAL BAB IV Tahap Perencanaan" halaman 45 - 66

- Kebijakan 1** : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.
- Kebijakan 2** : Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- Kebijakan 3** : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
- Kebijakan 4** : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.
- Kebijakan 5** : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman

5.4 Struktur Birokrasi Pekerjaan Umum Pada Program USRI IPAL⁸⁰

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kota/kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Kesemua staf dan pelaku organisasi pelaksana di tingkat kabupaten / kota yang dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota

- Pemerintah Kabupaten / Kota

⁸⁰ Cipta Karya "Pedoman Umum Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Perkotaan Bab IV" 2013

Pemerintah Kabupaten/kota dalam hal ini Bupati/Walikota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten/kota. Tugas dari pemerintah kabupaten/kota adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya.

Tugas Bupati/Walikota antara lain:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya;
- b. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan SPBM di wilayah kerjanya;
- c. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PU;
- d. Membentuk District Project Implementation Unit (DPIU);
- e. Menyediakan Dana Operasional Kegiatan DPIU melalui dana APBD Kabupaten/kota.
- f. Menetapkan lokasi sasaran kegiatan SPBM berdasarkan masukan dari DPIU
- g. Berperan sebagai pembina KPP.

➤ Tim Pengarah Kabupaten/Kota (TPK)

Tim Pengarah Kabupaten/Kota (TPK), akan menggunakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang telah dibentuk dalam program PNPM Mandiri, yang terdiri dari pejabat dari instansi/dinas terkait dengan koordinator berasal dari TKPKD Kabupaten/Kota.

Tugas dari Tim Pengarah Kabupaten/ Kota antara lain:

- a. Mensosialisasikan program pada tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Memberi arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program di wilayah

kerjanya;

- c. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten/ kota;
 - d. Melakukan pertemuan dengan DPIU dan Perangkat Kelurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan Program SPBM di wilayahnya dan melaporkannya kepada TPPr melalui PPIU.
- Unit Pelaksana Program Kabupaten/Kota District Project Implementation Unit (DPIU)

DPIU dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala/Wakil/Kepala Bidang pada Badan atau Dinas Teknis dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

Tugas DPIU antara lain:

- a. Membantu Tim Pengarah Kabupaten/Kota (TPK) dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan sosialisasi program SPBM dan promosi sanitasi kepada BKM/LKM untuk mendapatkan calon lokasi sasaran dengan memperhatikan dokumen SSK.
- c. Mengusulkan lokasi sasaran kegiatan kepada pimpinan daerah untuk ditetapkan sebagai lokasi sasaran.
- d. Melaksanakan peningkatan pemahaman dan dukungan program kepada stakeholder terkait dan kelompok peduli di Tingkat Kabupaten/Kota.

- e. Menetapkan Gender Focal Point dari Kabupaten/Kota.
- f. Membangun kemitraan diantara stakeholder di tingkat kabupaten/kota.
- g. Mengkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program SPBM di Tingkat Kabupaten/Kota
- h. Memfasilitasi pembentukan Pokja Sanitasi Kelurahan, KSM Sanitasi dan KPP.
- i. Memastikan bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan kepedulian terhadap penduduk miskin telah dipertimbangkan di dalam perumusan dokumen CSIAP dan RKM.
- j. Bersama Satker PIP/PPK, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tingkat kabupaten/kota.
- k. Fasilitasi pelaksanaan audit.
- l. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
- m. Mengumpulkan dokumen SP2D dari Satker PIP/PPK Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPIU.
- n. Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah Kabupaten/Kota secara berkala.
- o. Melakukan proses perolehan dana operasional kegiatan DPIU dari APBD Kabupaten/Kota.
- p. Mengusulkan revisi dokumen SSK kepada Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota apabila diperlukan.
- q. Memfasilitasi kegiatan serah terima infrastruktur dan pembinaan terhadap

KPP.

- r. Melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat kepada BKM/LKM, KSM Sanitasi dan KPP.
 - s. Melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dan memantau proses pengajuan dan pemanfaatan dana BLM.
 - t. Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) dari Satker PIP/PPK Kabupaten/Kota kepada PPIU setiap bulan.
 - u. Menyampaikan Laporan kinerja tiga bulanan TFL dan TAMK kepada PPIU dan ditembuskan kepada CPMU;
 - v. Memberikan pendampingan kepada BKM/LKM dalam hal tidak tersedia TFL.
 - w. Mengatur pelaksanaan pertemuan koordinasi dua mingguan dengan TFL,
 - x. TAMK dan Satker serta melakukan pencatatan hasil pertemuan tersebut untuk kemudian dilampirkan pada laporan bulanan DPIU.
- Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Program SPBM di tingkat kabupaten/kota berada pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten/Kota dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Kelembagaan Satker PIP Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat

Penandatanganan SPM dan Bendahara. Penyelenggaraan SPBM di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi. PPK tingkat kabupaten/kota bertugas mengelola dana BLM di tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tugas Satuan Kerja Tingkat Kabupaten/kota antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan DPIU dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program.
- b. Menandatangani dokumen kontrak (SP3) dengan BKM/LKM.
- c. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan rekomendasi dari TAMK dan TFL.
- d. Fasilitasi kepada BKM mengenai kelengkapan dokumen pendukung untuk syarat pencairan dana.
- e. Dibantu oleh TAMK dan TFL, melakukan pemeriksaan kepada BKM/LKM dan KSM mengenai kemajuan fisik dan keuangan.
- f. Melakukan amandemen/addendum dokumen kontrak (SP3) apabila diperlukan.
- g. Membuat dan menyampaikan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) termasuk dokumentasi foto kepada DPIU berdasarkan SP2D dan kemajuan fisik di lapangan.
- h. Menyampaikan dokumen SP2D dan kelengkapannya kepada DPIU.
- i. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

- j. Melakukan update progres keuangan dan fisik melalui website E-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum secara regular dan atau pada saat terjadi transaksi keuangan.
- k. Melakukan pembinaan kepada BKM/LKM, dan KSM Sanitasi.
- l. Melakukan pemeriksaan dokumen untuk kelengkapan serah terima hasil penyelesaian pekerjaan fisik.
- m. Mengambil tindakan terhadap BKM/LKM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak (SP3).
- n. Melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi auditor.

5.4.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pemerintah kelurahan, dalam hal ini Lurah, antara lain bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya.
- b. Menyelenggarakan Rembug Kesiapan Masyarakat (sosialisasi awal) dan memfasilitasi Rembug Warga selanjutnya.
- c. Memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan.
- d. Memantau penerapan prinsip-prinsip SPBM.
- e. Memfasilitasi terbentuknya KSM Sanitasi, KPP dan menjamin prosesnya secara demokratis, melalui forum Rembug Masyarakat Kelurahan.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan review PJM Pronangkis dan penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP).
- g. Mendukung implementasi CSIAP melalui sinkronisasi program dan

channeling ke stakeholders lainnya.

- h. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- i. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program SPBM.
- j. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh BKM/LKM.
- k. Memfasilitasi KSM Sanitasi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta memfasilitasi KPP dalam pengelolaan hasil infrastruktur terbangun.
- l. Menerima prasarana/sarana sanitasi terbangun dari pemerintah daerah dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan paska konstruksi.

5.4.3 Organisasi Tingkat Pengelola Masyarakat

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan, sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari proses penyiapan masyarakat, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Pengelolaan Program SPBM di tingkat kelurahan dilaksanakan melalui organisasi/lembaga masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat dengan didampingi oleh tim fasilitator.

➤ **BKM/LKM**

Sesuai dengan prinsip keterpaduan program, maka pelaksanaan kegiatan SPBM akan menggunakan lembaga masyarakat yang sudah ada dan telah berperan aktif dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP), yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di lokasi kelurahan sasaran. BKM/LKM adalah penanggung jawab pelaksanaan Program SPBM di tingkat masyarakat.

Secara rinci tugas BKM/LKM dalam Program SPBM adalah:

- a . Melakukan penyebarluasan informasi mengenai Program SPBM secara terus menerus di tingkat masyarakat.
- b . Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman di tingkat kelurahan.
- c . Menyelenggarakan rembug masyarakat kelurahan dan rembug warga.
- d . Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan;
- e . Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (*Community SanitationImprovement Action Plan*) bersama-sama dengan Pokjasan kelurahan.
- f . Memfasilitasi pembentukan KSM Sanitasi dan KPP .
- g . Bersama KSM menyusun dan mengajukan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).
- h . Mengajukan CSIAP dan RKM kepada DPIU untuk diverifikasi.

- i. Membuka rekening atas nama BKM/LKM dengan tanda tangan 2(dua) orang dari BKM/LKM, disarankan agar KSM juga ikut bertanda tangan sehingga jumlah yang bertanda tangan di buku rekening menjadi 3(tiga) orang.
- j. Menjamin dan memfasilitasi terlaksananya transparansi kegiatan.
- k. Menandatangani kontrak kerja (SP3) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- l. Melakukan pengajuan pencairan dana BLM kepada PPK.
- m. Membuat Buku Kas Umum disertai dengan bukti-bukti pengeluaran berdasarkan laporan yang dibuat oleh KSM.
- n. Menyusun laporan keuangan berdasarkan laporan penggunaan dana yang dibuat oleh KSM.
- o. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik.
- p. Mengelola pengaduan masyarakat.
- q. Mendampingi KSM dalam menyelenggarakan rembuk warga untuk menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- r. Mempublikasikan laporan setiap bulan kemajuan kegiatan melalui papan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak.
- s. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan dibantu KSM Sanitasi.
- t. Bersama KSM menyelenggarakan rembuk warga RT/RW IV untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dana BLM.

- u. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan SPBM;

➤ **Kader Masyarakat**

Kader Masyarakat adalah Kader Masyarakat yang sudah ada di masing-masing lokasi kelurahan sasaran yang terpilih melalui Program PNPM Perkotaan (P2KP) sebelumnya, yang merupakan warga setempat yang memiliki kemampuan mengajak dan mendorong masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Program SPBM.

Tugas dan fungsi Kader Masyarakat dalam program SPBM adalah :

- a. Sebagai mitra TFL, BKM/LKM, Pokjasa Kelurahan, dan KSM dalam pendampingan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan SPBM.
- b. Sebagai tenaga pendampingan KPP pada tahap paska konstruksi.
- c. Sebagai penggerak dan narasumber yang terkait dengan kondisi kelurahan dan bertindak sebagai mediator, pengarah, sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan program SPBM agar pelaksanaan program di tingkat kelurahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

➤ **Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (KSM Sanitasi)**

BKM/LKM memfasilitasi pembentukan KSM Sanitasi melalui Rembug Warga di tingkat RT/RW II dengan bentuk dan susunan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan minimal 40% keanggotaannya adalah kaum perempuan. Kepengurusan KSM tidak boleh dirangkap oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan BKM/LKM serta

pengurus KSM yang terbentuk tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif.

BKM/LKM dapat memfasilitasi pembentukan lebih dari satu KSM Sanitasi sesuai dengan dana BLM yang diterima.

Tugas KSM Sanitasi antara lain :

- a. Bersama dengan Kader Masyarakat menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan sarana/prasarana sanitasi, DED, RAB difasilitasi oleh fasilitator.
 - b. Sebagai koordinator utama dan penanggung jawab pelaksanaan fisik/konstruksi.
 - c. Menyusun rencana pendanaan operasi dan pemeliharaan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan dapat diperoleh melalui swadaya maupun melalui sumber pendanaan APBD Kelurahan
 - d. Menyusun rencana penggunaan dana (RPD) yang akan diajukan kepada BKM/LKM.
 - e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan pembangunan prasarana/sarana sanitasi setiap minggu kepada BKM/LKM, dilengkapi dengan bukti dokumen yang diperlukan.
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pokjasan kelurahan, BKM/LKM, Kader Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan selama pelaksanaan konstruksi;
- Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Secara inti kepengurusan maupun keanggotaannya KPP diutamakan berasal dari KSM Sanitasi yang telah melaksanakan pembangunan sarana sanitasi dan penerima manfaat. Hal ini dimungkinkan karena merekalah (KSM Sanitasi) yang telah merencanakan dan membangun sarana tersebut. Dengan demikian mereka bersama masyarakat akan semakin bertanggung jawab pada upaya menjaga dan merawat sarana tersebut. Pembentukan KPP dilakukan dalam kegiatan Rembug Warga RT/RW III. Untuk memformulasikan hal ini, maka dalam AD/ART KSM Sanitasi sudah harus dimunculkan pasal tentang Operasi.

Pemeliharaan. Ketua KPP tidak boleh dirangkap oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator BKM/LKM dan Ketua KSM. Pengurus KPP yang terbentuk tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Tugas dan fungsi KPP adalah :

- Iuran Pengguna :
 - o Merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana
 - o Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin.
- Operasional & Pemeliharaan
 - o Mengoperasikan dan memelihara sarana fisik Sanitasi Berbasis Masyarakat
 - o Mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin
 - o Mengembangkan mutu pelayanan & jumlah sarana pengguna
- Penyuluhan Kesehatan

- o Melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

5.4.4 Konsultan Manajemen

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program SPBM didukung oleh konsultan yang memberi pendampingan teknis dan pemberdayaan yang ditempatkan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan Kelurahan. Tugas konsultan manajemen di tingkat pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

➤ **National Project Management Consultant (NPMC)**

NPMC bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada CPMU dalam menyelenggarakan Program SPBM agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan prinsip-prinsip, pendekatan, kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan program.

NPMC terdiri dari: i) Team Leader, ii) Deputy TL untuk RIS, iii) Deputy TL untuk Urban Sanitasi, iv) Tenaga Ahli Finansial Manajemen, v) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat/Gender, vi) Tenaga Ahli Public Awareness Campaign/Ahli Safeguard, vii) Tenaga Ahli Sistem Informasi Manajemen, viii) Tenaga Ahli Infrastruktur RIS, ix) Tenaga Ahli Pelatihan, x) xi) dua orang Tenaga Ahli Sanitasi untuk Urban Sanitasi. NPMC bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada CPMU.

Tugas NPMC antara lain:

- a. Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada CPMU dalam penyelenggaraan Program SPBM di tingkat pusat;
- b. Membantu CPMU dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi staff

CPMU, PPIU, DPIU, RPMC dan Tenaga Fasilitator Lapangan;

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Program SPBM;
- d. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada CPMU;
- e. Melakukan evaluasi program yang mencakup pencapaian tujuan dan sasaran program;
- f. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan CPMU, PPIU dan DPIU
- g. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan format-format yang telah ditetapkan, serta menyusun laporan triwulan, dan laporan lainnya yang disepakati dalam kontrak;
- h. Menyusun dan melaporkan kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program kepada CPMU dan kepada Satker Pusat;

➤ Regional Project Management Consultant (RPMC)

RPMC berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertugas mendukung PPIU dan DPIU dalam penyelenggaraan program dan selalu berkoordinasi dengan NPMC. RPMC bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada CPMU melalui Satker Pusat, PPIU, DPIU dan NPMC.

Di tingkat provinsi RPMC, disebut sebagai Tim Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr), terdiri dari : i) Team Leader, ii) Tenaga Ahli Finansial/Co Team Leader, iii) Tenaga Ahli Sanitasi; iv) Tenaga Ahli Community Development; v) Tenaga Ahli Pelatihan; dan vi) Tenaga Ahli

Gender/Safeguard. Di tingkat kota/kabupaten, Tim RPMC terdiri dari Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten / Kota (TAMK) dan tim pendukung.

Pada tahap persiapan, RPMC berkewajiban menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan narasumber dari Tim Pengarah, CPMU dan NPMC.

Pada tahap pelaksanaan, RPMC bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan, supervisi dan monitoring serta memberikan dukungan teknis dan manajemen dalam penyelenggaraan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab RPMC adalah:

- a. Membantu TPPr dan PPIU dalam mensosialisasikan Program SPBM kepada stakeholder kabupaten termasuk TAMK;
- b. Membantu Satker Provinsi dan PPIU dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana;
- c. Melakukan pendampingan kepada PPIU dan DPIU dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan sosialisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d. Menjamin penerapan prosedur dan pedoman dalam aspek pemberdayaan masyarakat, sosial, lingkungan dan pelaksanaan fisik;
- e. Menjamin penerapan Quality Assurance pada setiap tahapan pelaksanaan program;
- f. Menjamin penyebarluasan informasi program melalui media informasi dan komunikasi;

- g. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program dengan memberikan dukungan teknis dan manajemen program di tingkat kabupaten/kota;
- h. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada PPIU/DPIU;
- i. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan NPMC, PPIU, DPIU, Satker Pusat, Satker Provinsi dan Satker Kabupaten dalam penyelenggaraan program;
- j. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan);
- k. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, laporan interim dan laporan akhir serta melaporkannya kepada PPIU dan CPMU melalui Satker Pusat;
- l. Menyusun LMP (Laporan Manajemen Proyek) dan LMK (Laporan Manajemen Keuangan) pelaksanaan tingkat Provinsi untuk dilaporkan kepada PPIU;
- m. Menyusun draft laporan penilaian dampak proyek;

Dalam pelaksanaannya, pendampingan RPMC di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/Kota (TAMK) yang bertugas mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan capacity building bagi para pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan melalui sosialisasi dan pelatihan, pemantauan dan pemberian dukungan teknis

dalam penanganan permasalahan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. TAMK bertanggung jawab langsung atas mutu pelaksanaan program kepada DPIU dengan wajib berkoordinasi dengan RPMC tingkat provinsi, NPMC serta Satker Kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab TAMK antara lain:

- a. Membantu DPIU dalam perencanaan kegiatan SPBM di tingkat kabupaten/kota;
- b. Membantu penyiapan pelaksanaan Rembug Kelurahan dan penyiapan penerapan prosedur dan pedoman baik teknis maupun non teknis seperti pemberdayaan masyarakat, sosial, lingkungan, teknis pelaksanaan prasarana;
- c. Memberikan dukungan upaya penyadaran sanitasi dan promosi perubahan perilaku masyarakat melalui program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan;
- e. Memberikan dukungan kepada Satker Kabupaten/Kota dalam hal persetujuan hasil review PJM Pronangkis/RKM dan RAB yang disusun oleh BKM/LKM;
- f. Melakukan pelatihan kepada BKM/LKM, KSM dan KPP dalam penyusunan administrasi pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- g. Mendukung Tenaga Ahli Pelatihan dalam penyiapan kebutuhan pelatihan

- dan pemantauan hasil pelatihan;
- h. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tahapan kegiatan;
 - i. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada DPIU dan BKM/LKM;
 - j. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program SPBM di wilayah kerjanya;
 - k. Melakukan evaluasi kinerja TFL setiap tiga bulan dan hasilnya disampaikan kepada RPMC, DPIU dan Sakter PLP Provinsi.
 - l. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPIU, Satker Kabupaten/kota, RPMC dan TFL;
 - m. Mengumpulkan data pencairan dana/rekapitulasi SPM dan SP2D di lingkup wilayah kerjanya dan disampaikan kepada RPMC;
 - n. Menjamin spesifikasi teknis prasarana/sarana Sanitasi yang direncanakan oleh BKM/LKM sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan;
 - o. Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan;
 - p. Melaksanakan verifikasi perencanaan dan verifikasi dokumen pencairan;
 - q. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan format-format yang telah ditetapkan, serta menyusun laporan triwulan, dan laporan lainnya yang disepakati dalam kontrak;
 - r. Meningkatkan peran KSM Sanitasi/KPP untuk keberlanjutan dan pengembangan prasarana/sarana terbangun;
 - s. Menyusun LMP (Laporan Manajemen Proyek) dan LMK (Laporan

Manajemen Keuangan) tingkat Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada DPIU.

5.4.5. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan program secara langsung di tingkat masyarakat kelurahan. Jumlah Fasilitator disesuaikan dengan jumlah kelurahan sasaran dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan, dengan jumlah 30% dari total fasilitator adalah perempuan.

Setiap tim Fasilitator terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan sanitasi, 1 (satu) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator manajemen untuk menangani 3 (tiga) lokasi. Fasilitator mempunyai tugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan Program SPBM dan penerapan prinsip-prinsip program

Tim Fasilitator tidak boleh merangkap pekerjaan ditempat lain dan juga tidak boleh merangkap sebagai BKM/LKM, KSM dan KPP, serta tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif atau sebagai partisipan calon legislatif.

➤ Fasilitator Pemberdayaan Sanitasi

Tugas Fasilitator Pemberdayaan Sanitasi adalah :

- a. Melakukan pemicuan kepada masyarakat terhadap pentingnya sanitasi.
- b. Memfasilitasi dan mendukung BKM/LKM dalam penyusunan CSIAP dan mendukung KSM Sanitasi dalam menyusun rencana pembangunan (RKM) sesuai dengan panduan dan ketentuan, termasuk mereview rencana tersebut

untuk menjamin bahwa sudah terdapat program PHBS.

- c. Mendampingi penyusunan pelaporan administrasi keuangan yang dilakukan oleh BKM/LKM dan KSM Sanitasi.
- d. Menjamin bahwa kelompok penerima manfaat termasuk perempuan, kelompok rentan dan penduduk miskin sudah dilibatkan pada saat proses persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.
- e. Memfasilitasi proses penilaian, analisis dan rencana kerja yang dilakukan oleh BKM/LKM dan KSM dengan menggunakan tahapan PHAST, berkaitan dengan penyusunan CSIAP dan RKM.
- f. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan pada setiap tahapan kegiatan.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada RPMC/TAMK (Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/kota).
- h. Membantu BKM dalam menentukan iuran untuk pemanfaat dengan mempertimbangkan kemampuan keluarga yang paling miskin.
- i. Menjamin besarnya iuran akan menutupi minimum biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana sanitasi.

➤ Fasilitator Teknik

Tugas Fasilitator Teknik adalah:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat.

- b. Melakukan pendampingan dalam rebug kelurahan, rebug warga dan pelatihan kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi terkait dengan aspek teknis pelaksanaan program.
- c. Mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM/ LKM, Kader Masyarakat, KSM Sanitasi dan aparat kelurahan untuk melakukan identifikasi permasalahan sanitasi dan kebutuhan prasarana/sarana.
- d. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan CSIAP dan RKM.
- e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis (Detailed Engineering Design/DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- f. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana.
- g. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada BKM dan KSM Sanitasi pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana/sarana sanitasi.
- h. Melakukan pendampingan teknis terhadap KSM Sanitasi dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan.
- i. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya.
- j. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola kegiatan di tingkat kelurahan dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/kota).

➤ Fasilitator Manajemen

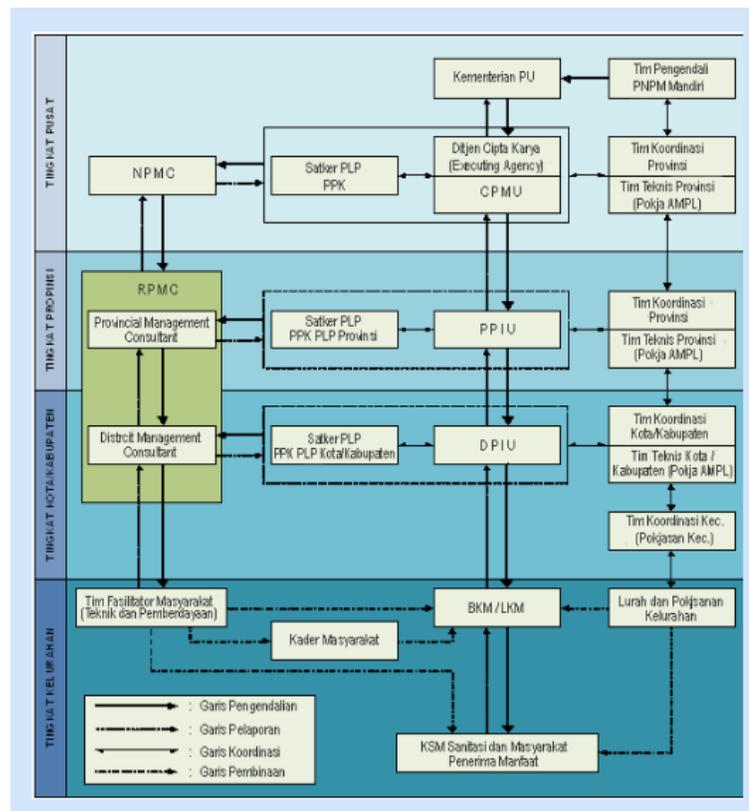
Tugas Fasilitator Manajemen adalah :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat.
- b. Melakukan pendampingan musyawarah desa kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi terkait dengan aspek manajemen pelaksanaan program.
- c. Mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM/LKM, Kader Masyarakat, KSM Sanitasi dan perangkat pemerintahan kelurahan dalam melakukan identifikasi permasalahan sanitasi.
- d. Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rebug kelurahan dan pelatihan.
- e. Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen kegiatan.
- f. Pendampingan kepada BKM/LKM/Pokjasan dan KSM Sanitasi dalam menyusun CSIAP dan RKM.
- g. Melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat desa di wilayah kerjanya mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban.
- h. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga

Ahli Manajemen Kabupaten/Kota).

Berikut merupakan bentuk dari struktur organisasi atau birokarasi dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat perkotaan secara umum.

Gambar 5.1.



Keterangan :

CPMU : Central Project Management Unit

PPIU : Provincial Project Implementation Unit

DPIU : District Project Implementation Unit

NPMC : National Project Management Consultant

RPMC : Regional Project Management Consultant

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita, hal. 177.
- Cipta Karya . “Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat BAB III” 2013.
- Cipta Karya, “ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Barang dan Jasa”
- Eris Praghina, 2011, Kontribusi Pinjaman ADB Terhadap Program Pembangunan Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2004-2009, Tesis, FISIP Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.
- H. Pulzl dan O. Treib, 2007, Implementing Public Policy: Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press Taylor & Francis Group, hal. 89.
- Indah Maisuri, 2015, Peran International Monetary Fund (IMF) Dalam Pemulihan Perekonomian Seychelles Tahun 2008 - 2013, Journal Online Mahasiswa (JOM) FISIP, Vol. 2, No. 2, Oktober: 1-13.
- Indah Sakti Pratiwi, 2013, Intervensi Bank Dunia (World Bank) Dalam Privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia (Studi Kasus: Privatisasi PAM Jaya Jakarta), eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 4: 1133-1140.
- Joko Widodo, 2009, Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 97.
- Kementerian PU, 2013, Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 2013, Jakarta: Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI. Adam Sibley. United Nations “world summit on sustainable development (WSSD), Johannesburg, South Africa.

Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 149.

Riant Nugroho, 2012, Public Policy. Jakarta: Gramedia, hal. 191.

WEBSITE/ ARTIKEL

Ahmad Jamli, 2009, Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter, Seri Diktat Kuliah Universitas Gunadarma,

[

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijaksanaan_fiskal_moneter/bab4-

[bantuan_luar_negeri_pemerintah_dalam_perekonomian_indonesia.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijaksanaan_fiskal_moneter/bab4-bantuan_luar_negeri_pemerintah_dalam_perekonomian_indonesia.pdf)]

ADB, 31 Desember 2012, Asian Development Bank & Indonesia, [<http://adb.org/sites/default/files/pub/2013/indonesia-factsheet-id.pdf>Deforestasi dan Degradasi Hutan]

ADB, 2016, Members

[<http://www.adb.org/about/members>]

ADB, 2016, Our Work,

[<http://www.adb.org/about/our-work>]

Merry Wahyuningsih, 25 Maret 2013, 10 Negara dengan Sanitasi Terburuk di Dunia, Indonesia Peringkat 2,

[<http://health.detik.com/read/2013/03/25/090253/2202429/763/10-negara-dengan-sanitasi-terburuk-di-dunia-indonesia-peringkat-2>]

Tabita Diela, 31 Oktober 2013, Indonesia, Negara dengan Sanitasi Terburuk Kedua di Dunia!

[<http://properti.kompas.com/read/2013/10/31/1209048/Indonesia.Negara.dengan.Sanita.Terburuk.Kedua.di.Dunia>]

Republika, 19 Desember 2008, Sistem Sanitasi di Indonesia Perlu Dibenahi,

[<http://www.republika.co.id/berita/shortlink/21190>.]

Berita Satu, 29 Mei 2012, Sanitasi RI Terburuk Ke 3 di ASEAN, ADB Hibahkan Dana US\$ 60 Juta,
[<http://www.beritasatu.com/nasional/50804-sanitasi-ri-terburuk-ke-3-di-asean-adb-hibahkan-dana-us-60-juta.html>]

Kementerian PU, 2 Desember 2014, Setelah Ada IPAL Bikin WC Jadi Lebih Murah,
[<http://ciptakarya.pu.go.id/spbm-usri/bagus/Setelah-Ada-IPAL-Bikin-WC-Jadi-Lebih-Murah>]

Netral News, 3 Agustus 2016, Ini Pemberi Pinjaman Terbanyak untuk Indonesia,
[<http://netralnews.com/news/ekonomi/read/17244/ini.pemberi.utang.terbanyak.untuk.indonesia>]

Miftahul Hidayah, 1 April 2015, Utang Luar Negeri: Masalah atau Solusi Baru?
[http://www.kompasiana.com/www.mifta.com/utang-luar-negeri-masalah-atau-solusi-baru_5554610f739773281490552b]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
“Sejarah Pekerjaan Umum, dari Masa Ke Masa” PU-Net.
[<http://www.pu.go.id/content/show/34/Dari-Masa-Ke-Masa>]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Tugas dan Fungsi Pekerjaan Umum.
[<http://www.pu.go.id/content/show/14/Tugas-dan-Fungsi>]

Balitbang, Hadirkan Solusi, Seiring Inovasi
[<http://litbang.pu.go.id/litbang/profile>]

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tentang Program Sanitasi Perkotaan berbasis masyarakat,
[<http://ciptakarya.pu.go.id/spbm-usri/index.php?page=sanitasi/tentang> pada tanggal 20 juni 2017]

Posisi Geografis Indonesia dalam Peta Dunia, diakses dari alamat
<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/posisi-geografis-indonesia>

Direktorat Pinjaman dan Hibah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia “ Laporan Pengelolaan
Pinjaman dan Hibah Pemerintah Semester 1 Tahun 2011”
[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Lap_Pengelolaan_P
H_Semester1.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Lap_Pengelolaan_P_H_Semester1.pdf)

Development Goals .17 Goals to transform our World.
[http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/#prettyPhoto](http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/#prettyPhoto)

United Nations, “ Clean Water and Sanitation. Why it matter?”
[http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf](http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf)

Unicef Indonesia, October 2012. “issue Briefs. Water, Sanitation and
Hygiene” [https://www.unicef.org/indonesia/A8-
_E_Issue_Brief_Water_Sanitation_REV.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/A8-_E_Issue_Brief_Water_Sanitation_REV.pdf)

The World Bank, March 21 2017. “ Meeting Indonesia’s urban Sanitation
Needs”
[http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/21/meeting-
indonesia-urban-sanitation-needs](http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/21/meeting-indonesia-urban-sanitation-needs)

The World Bank, October 28 2013. “ Poor sanitation Impedes Indonesia’s
Growth Potential
[http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/28/Poor-
Sanitation-Impedes-Indonesia-8217-s-Growth-Potential](http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/28/Poor-Sanitation-Impedes-Indonesia-8217-s-Growth-Potential)

Pemerintah Kota Malang. ”Sejarah Malang”
<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>

Pemerintah Kota Malang, DPUPR . 14 Maret 2017 “DPUPR, Pembuangan
Sanitasi di Kota Malang kebanyakan berujung di Sungai”

<http://dpupr.malangkota.go.id/dpupr-pembuangan-sanitasi-kota-malang-kebanyakan-berujung-sungai>

Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kota Malang 2016 .

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d6rzjD-OS3MJ:ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/newssk/kota.malang/Bab%25204_SSK_250916%252020161005.docx+%&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id